

Katalog BPS : 4102004.7312

Tahun
2016

INKESRA
INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

<https://soppengkab.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SOPPENG**

**INDIKATOR
KESEJAHTERAAN RAKYAT
KABUPATEN SOPPENG
2016**

<https://soppengkab.bps.go.id>

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN SOPPENG 2016

Nomor Publikasi : 73122.1622
Katalog BPS : 4102004.7312

Ukuran : 17,6 x 25 cm
Jumlah Halaman : xv + 74 halaman

Pembina : Ir. H. Rustan
Pengarah : A. Awaluddin

Penyusun : Vina Suci Romadhona, S.ST
Gambar Kulit : Vina Suci Romadhona, S.ST
Lay Out : Vina Suci Romadhona, S.ST

Diterbitkan oleh :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SOPPENG
Jl. Salotungo, Watansoppeng, 90812
Telp: (0484) 21060, Fax: (0484) 23377
Website: <http://soppengkab.bps.go.id>
Email: soppengkab@bps.go.id



KATA PENGANTAR

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Soppeng Tahun 2016 disusun sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan konsumen data yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat di daerah ini. Selain itu, juga diharapkan sebagai bahan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan khususnya di bidang sosial.

Publikasi ini memuat berbagai indikator antara lain; Indikator Kependudukan, Fertilitas dan Keluarga Berencana, Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Perumahan dan indikator lainnya. Indikator-indikator tersebut, secara umum dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat Kabupaten Soppeng.

Disadari bahwa publikasi ini belum sepenuhnya memuaskan semua konsumen data. Saran yang konstruktif tetap diharapkan guna penyempurnaan publikasi berikutnya. Akhirnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung sehingga terwujudnya publikasi ini diucapkan terima kasih.

Watansoppeng, November 2017
BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SOPPENG
Kepala,

IR. H. RUSTAN

NIP : 19661115 199301 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
NOMOR KATALOG	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
ISTILAH TEKNIS	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	1
1.3 Sumber Data.....	2
1.4 Sistematika Penulisan.....	2
BAB II KEPENDUDUKAN	4
2.1 Piramida Penduduk	4
2.2 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk	6
2.3 Persebaran dan Kepadatan Penduduk	8
2.4 Kelompok Usia dan Jenis Kelamin.....	11
2.5 Status Perkawinan.....	13

	Halaman
BAB III FERTILITAS DAN KELUARGA BERENCANA (KB)	16
3.1 Usia Perkawinan Pertama.....	17
3.2 Pemakaian Alat/Cara KB	18
BAB IV PENDIDIKAN	22
4.1 Sarana Pendidikan.....	23
4.1.1 Indikator Daya Tampung Sekolah	24
4.1.2 Indikator Kecukupan Tenaga Pendidikan	25
4.2 Partisipasi Sekolah.....	26
4.2.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS).....	27
4.2.2 Angka Partisipasi Murni (APM).....	29
4.3 Rata-rata Lama Sekolah (RLS).....	31
4.4 Tingkat Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan	32
BAB V KESEHATAN	34
5.1 Derajat Kesehatan Masyarakat.....	34
5.2 Status Kesehatan Masyarakat.....	37
5.3 Pemberian ASI.....	39
5.4 Pemberian Imunisasi.....	40
5.5 Fasilitas Kesehatan.....	42
5.6 Tenaga Kesehatan.....	43

	Halaman
BAB VI PERUMAHAN	45
6.1 Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal	46
6.2 Kualitas Perumahan.....	47
6.2.1 Jenis Atap Terluis.....	47
6.2.2 Jenis Dinding Terluis.....	49
6.2.3 Jenis dan Luas Lantai.....	50
6.3 Fasilitas Perumahan.....	51
6.3.1 Sumber Air Minum.....	51
6.3.2 Fasilitas Penerangan.....	53
6.3.3 Fasilitas Buang Air Besar.....	55
BAB VII LAIN-LAIN	59
7.1 Golongan Pengeluaran Per Kapita.....	59
7.2 Pengeluaran Per Kapita Sebulan dan Pola Konsumsi Penduduk	61
7.3 Penduduk Miskin.....	63
Tabel	66
Lampiran	

DAFTAR TABEL

	Halaman	
Tabel 2.1	Jumlah Penduduk, Rasio Jenis Kelamin, dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2016	7
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Soppeng Tahun 2016	8
Tabel 2.3	Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Soppeng Tahun 2016	10
Tabel 2.4	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Angka Beban Ketergantungan (ABK) di Kabupaten Soppeng Tahun 2015 dan 2016	12
Tabel 2.5	Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan Tahun 2016 di Kabupaten Soppeng	14
Tabel 3.1	Persentase Wanita Kawin Usia 15-49 Tahun menurut Partisipasi KB di Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2016	19
Tabel 4.1	Jumlah Sekolah, Murid dan Rasio Murid Terhadap Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Soppeng Tahun Ajaran 2015/2016 dan 2016/2017	25
Tabel 4.2	Jumlah Murid, Guru dan Rasio Murid Terhadap Guru menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Soppeng Tahun Ajaran 2015/2016 dan 2016/2017	26
Tabel 5.1	Persentase Balita yang Menerima Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2016	41
Tabel 6.1	Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Atap Terluas di Kabupaten Soppeng Tahun 2015-2016	48
Tabel 6.2	Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Kloset yang digunakan di Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2016	57

	Halaman
Tabel 7.1 Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran per Kapita di Kabupaten Soppeng Tahun 2015-2016	60
Tabel 7.2 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan di Kabupaten Soppeng Tahun 2015-2016 (Rupiah)	62
Tabel 7.3 Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2016	64

<https://soppengkab.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Piramida Penduduk Kabupaten Soppeng Tahun 2016	5
Gambar 2.2 Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Soppeng Tahun 2016	9
Gambar 2.3 Persentase Wanita 15-49 Tahun Menurut Status Perkawinan di Kabupaten Soppeng Tahun 2016	15
Gambar 3.1 Persentase Wanita Usia 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Umur Kehamilan Pertama Tahun 2016	17
Gambar 3.2 Persentase Akseptor Aktif KB Menurut Metode Kontrasepsi yang Digunakan di Kabupaten Soppeng Tahun 2016	21
Gambar 4.1 Jumlah Sarana Pendidikan Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Soppeng Tahun 2016	23
Gambar 4.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2016	28
Gambar 4.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin di Kabupaten Soppeng Tahun 2016	29
Gambar 4.4 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Soppeng Tahun 2016	30
Gambar 4.5 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2016	31
Gambar 4.6 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki di Kabupaten Soppeng Tahun 2016	32
Gambar 5.1 Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2016	35
Gambar 5.2 Persentase Persalinan menurut Penolong Persalinan Pertama di Kabupaten Soppeng Tahun 2015-2016	36
Gambar 5.3 Angka Kesakitan/Morbidity Rate (MR) menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2016	38
Gambar 5.4 Lama Pemberian ASI pada Balita (0-23 Bulan) di Kabupaten Soppeng Tahun 2016	40

	Halaman
Gambar 5.5 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Soppeng Tahun 2016	42
Gambar 5.6 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Soppeng Tahun 2016	43
Gambar 6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Soppeng Tahun 2016	46
Gambar 6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Terluas di Kabupaten Soppeng Tahun 2016	50
Gambar 6.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas di Kabupaten Soppeng Tahun 2016	51
Gambar 6.4 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum di Kabupaten Soppeng Tahun 2015-2016	52
Gambar 6.5 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum di Kabupaten Soppeng Tahun 2016	53
Gambar 6.6 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan di Kabupaten Soppeng Tahun 2016	54
Gambar 6.7 Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Buang Air Besar di Kabupaten Soppeng Tahun 2016	56
Gambar 6.8 Persentase Rumah Tangga menurut Tempat Pembuangan Tinja di Kabupaten Soppeng Tahun 2016	57
Gambar 7.1 Persentase Pengeluaran Penduduk untuk Makanan dan Non Makanan di Kabupaten Soppeng Tahun 2015 dan 2016	63

ISTILAH TEKNIS

• KEPENDUDUKAN •

Laju Pertumbuhan Penduduk

Perkembangan atau penambahan penduduk dalam kurun waktu tertentu, dan interpretasinya bahwa semakin kecil angka ini maka semakin mencerminkan kesuksesan penanganan/pengendalian jumlah penduduk.

Kepadatan Penduduk

Angka yang menggambarkan banyaknya penduduk per kilometer persegi. Angka ini diinterpretasikan bahwa semakin tinggi angka yang diperoleh maka semakin padat penduduknya.

Angka Beban Ketergantungan (ABK)

Perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) dengan penduduk usia tidak produktif (usia di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas).

Rasio Jenis Kelamin (RJK)

Rasio antara banyaknya laki-laki dengan banyaknya wanita dikalikan 100. Interpretasinya : bahwa apabila angka ini menunjukkan angka lebih dari 100, maka penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan.

Status Perkawinan

- **Kawin** adalah berada dalam ikatan perkawinan baik secara hukum adat, agama, negara dan sebagainya, maupun mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat dianggap sebagai suami istri.
- **Cerai hidup** adalah berpisah sebagai suami isteri karena bercerai dan belum kawin lagi. Wanita yang mengaku belum pernah kawin tetapi pernah hamil, dianggap cerai hidup.

- **Cerai mati** adalah ditinggal mati oleh suami atau isterinya dan belum kawin lagi.

• FERTILITAS DAN KELUARGA BERENCANA (KB) •

Paritas/Anak Lahir Hidup

Banyaknya kelahiran hidup dari sekelompok atau beberapa kelompok wanita selama masa produksinya. Paritas merupakan ukuran fertilitas dari satu kohor yang mengukur fertilitas yang telah dicapai oleh wanita dari kelompok usia yang berbeda-beda, mulai masuk usia reproduksi hingga waktu pencacahan.

Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)

Rata-rata anak yang dilahirkan oleh wanita selama masa reproduksinya.

Metode Kontrasepsi

Cara/alat pencegah kehamilan, baik secara modern maupun secara tradisional.

Peserta Keluarga Berencana (Akseptor)

Orang yang mengikuti/memakai salah satu metode kontrasepsi.

• PENDIDIKAN •

Rasio Murid – Sekolah (RMS)

Angka yang mencerminkan daya tampung per sekolah atau menggambarkan rata-rata banyaknya murid pada setiap sekolah dalam setiap jenjang pendidikan.

Rasio Murid – Guru (RMG)

Angka yang menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar atau dengan kata lain memperlihatkan mutu pengajaran/pengawasan dan perhatian guru di kelas.

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Perbandingan antara penduduk yang bersekolah pada tingkat pendidikan tertentu tanpa memperhatikan usianya dengan jumlah penduduk pada usia tingkat pendidikan masing-masing. Indikator ini menggambarkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan serta menunjukkan banyaknya penduduk yang menerima pendidikan pada suatu tingkat tertentu.

Angka Partisipasi Murni (APM)

Proporsi murid yang bersekolah pada suatu tingkat pendidikan tertentu dalam kelompok usianya (tepat waktu) terhadap jumlah penduduk kelompok usia pendidikan tersebut.

Angka Partisipasi Kasar (APK)

Proporsi murid yang bersekolah pada suatu tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia pendidikan tersebut. Indikator ini menggambarkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan serta menunjukkan banyaknya penduduk yang menerima pendidikan pada suatu tingkat tertentu.

Angka Putus Sekolah (APTS)

Proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu tingkat pendidikan tertentu. Indikator ini digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok usia.

Angka Melek Huruf (AMH)

Kemampuan seseorang untuk dapat membaca dan menulis. Angka ini dapat memberikan informasi tentang kemajuan pendidikan suatu bangsa/daerah, serta adanya pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan.

• KESEHATAN •

Angka Harapan Hidup (AHH)

Jumlah tahun yang dapat diharapkan seseorang masih hidup. Angka ini mencerminkan status kesehatan penduduk atau keadaan sosial ekonomi penduduk dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Interpretasi, semakin tinggi angka harapan hidup maka semakin berhasil pembangunan dibidang sosial ekonomi suatu daerah terutama dibidang kesehatan.

Angka Kesakitan/ Morbidity Rate (MR)

Proporsi penduduk yang mengalami keluhan kesehatan sampai mengakibatkan terganggunya pekerjaan, sekolah maupun kegiatan sehari-hari terhadap keseluruhan penduduk yang ada di wilayah tersebut.

Keluhan Kesehatan

Keluhan Kesehatan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena penyakit akut, penyakit kronis, kecelakaan, kriminal atau lain hal.

Sakit/terganggu kesehatan

Sakit/terganggu kesehatan adalah tidak dapat melakukan kegiatan secara normal (bekerja, sekolah, kegiatan sehari-hari) sebagaimana biasanya karena sakit tersebut.

Imunisasi

Pemberian kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit dengan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh agar tubuh tahan terhadap penyakit yang sedang mewabah atau berbahaya bagi seseorang.

• PERUMAHAN •

• LAIN-LAIN •

Kemiskinan

Keadaan tidak tercapainya kehidupan yang layak atau;tidak dapat terpenuhinya kebutuhan minimum untuk pangan, perumahan, kesehatan dan pendidikan.

Penduduk Miskin

Seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar,. baik untuk makanan maupun non makanan atau penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Garis Kemiskinan

Nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari ditambah kebutuhan minimum non-makanan yang mencakup perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan pembangunan pada umumnya yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia yang sering disebut dengan kesejahteraan, melalui usaha-usaha di berbagai bidang salah satunya dalam bidang sosial. Kesejahteraan yang dimaksud tidak saja menyangkut kemampuan pemenuhan kebutuhan yang bersifat materiil, tetapi juga pemenuhan kebutuhan yang bersifat nonmateriil. Kebutuhan materiil diantaranya adalah sandang, pangan, dan perumahan, sedangkan kebutuhan nonmateriil diantaranya pendidikan, kesehatan, dan sanitasi lingkungan. Ukuran kesejahteraan hingga saat ini masih sulit untuk diketahui dan menjadi perdebatan karena kesejahteraan menyangkut segala sendi kehidupan manusia.

Dalam rangka perencanaan, pemantauan, dan pengukuran keberhasilan suatu tahap pembangunan diperlukan indikator sosial yang sering disebut sebagai indikator kesejahteraan rakyat. Indikator ini merupakan pelengkap dari indikator ekonomi yang diharapkan dapat menggambarkan fenomena yang terjadi di masyarakat.

1.2 Ruang Lingkup

Kesejahteraan mencakup kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin seluruh rakyat yang berisikan berbagai unsur kualitas kehidupan. Dalam pengertian yang luas, sangat tidak mungkin menyajikan data statistik yang mampu mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Indikator yang disajikan dalam publikasi ini merupakan indikator yang dapat diukur (*measurable welfare*). Oleh karena itu, statistik sosial merupakan komponen utama dalam penyusunan Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat di Kabupaten Soppeng

Tahun 2016 yang dibandingkan dengan keadaan tahun-tahun sebelumnya sehingga dapat mencerminkan perkembangannya.

1.3 Sumber Data

Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) untuk mendapatkan informasi mengenai kesejahteraan rakyat yang dapat mencerminkan keadaan sosial ekonomi antara lain kependudukan, fertilitas dan Keluarga Berencana (KB), pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan dan lain-lain. Selain itu terdapat pula data pendukung dari dinas/instansi yang diambil dari Soppeng dalam Angka.

Ilustrasi mengenai keadaan berbagai komponen sosial dapat diketahui dengan menyusun data agregat berupa indikator seperti tingkat partisipasi sekolah, pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk yang termasuk angkatan kerja, persentase akseptor KB, persentase ibu melahirkan yang ditolong oleh tenaga medis, persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air bersih atau telah menikmati listrik, rata-rata pengeluaran sebulan dan lain sebagainya.

1.4 Sistematika Penulisan

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Soppeng Tahun 2016 disusun dalam delapan bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan memuat latar belakang, ruang lingkup, sumber data dan sistematika penulisan.

BAB II Kependudukan memuat piramida penduduk, jumlah dan pertumbuhan penduduk, persebaran dan kepadatan penduduk, kelompok usia dan jenis kelamin, serta status perkawinan.

BAB III Fertilitas dan KB memuat usia perkawinan pertama, paritas/Anak Lahir Hidup (AHH), dan pemakaian alat/cara KB.

BAB IV Pendidikan memuat sarana pendidikan, Angka Partisipasi

Sekolah (APS), Angka Putus Sekolah (APTS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dan Angka Melek Huruf (AMH).

BAB V Kesehatan memuat derajat kesehatan masyarakat, status kesehatan masyarakat, pemberian ASI, pemberian imunisasi, fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan.

BAB VI Perumahan memuat status penguasaan bangunan tempat tinggal, jenis atap terluas, jenis dinding terluas, jenis dan luas lantai, sumber air minum, fasilitas penerangan, dan fasilitas buang air besar.

BAB VII Lain-lain memuat golongan pengeluaran, pengeluaran per kapita sebulan dan pola konsumsi penduduk, serta penduduk miskin.

Semua indikator di atas diulas serta dilengkapi dengan tabel dan grafik sehingga memudahkan para konsumen data dalam memahami kondisi sosial yang ada.

BAB II

KEPENDUDUKAN

Dalam mekanisme perencanaan pembangunan baik nasional maupun regional, penduduk dipandang sebagai salah satu faktor strategis dikarenakan penduduk bukan hanya merupakan sasaran tetapi juga sebagai pelaksana pembangunan.

Keberhasilan suatu pembangunan sangat tergantung pada penduduknya, terlebih jika didukung oleh jumlah penduduk yang besar, berkualitas dan produktif yang dapat menjadi sumber potensi dalam pembangunan itu sendiri. Akan tetapi, jumlah penduduk yang besar tersebut tidak dapat menjamin keberhasilan pembangunan jika tidak didukung oleh perencanaan program-program dan kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas penduduknya, tidak hanya yang bersifat mengendalikannya saja.

Sejalan dengan itu, diperlukan data-data kependudukan yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung setiap program peningkatan kualitas agar jumlah penduduk yang besar tersebut tidak hanya menjadi beban dalam pembangunan.

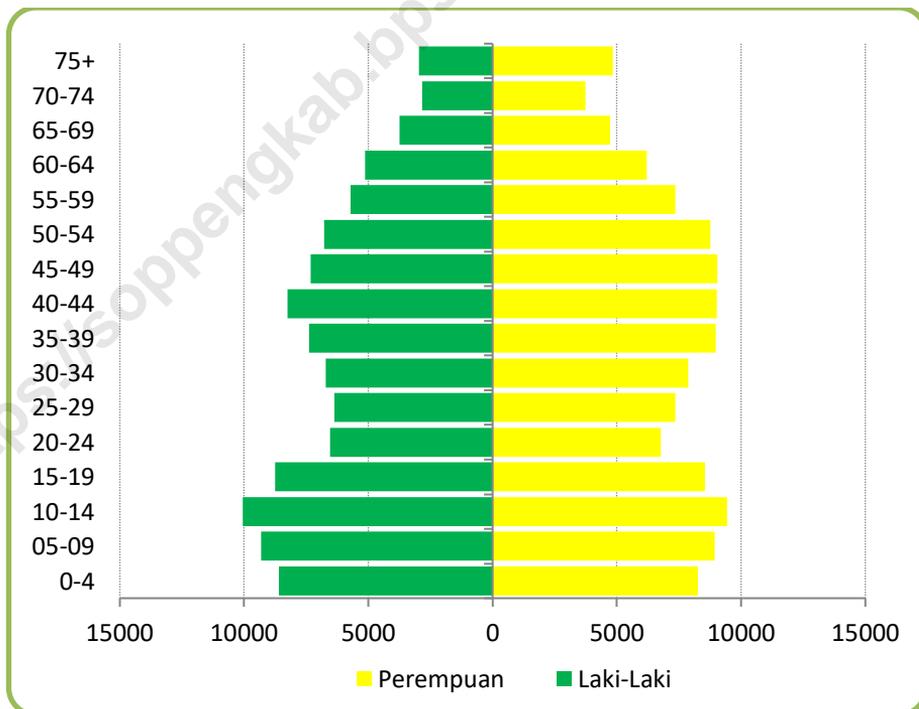
Pemerintah sangat membutuhkan data jumlah penduduk dan karakteristiknya, misalnya untuk merencanakan penyediaan sarana umum, perumahan, tempat ibadah, fasilitas kesehatan dan tempat rekreasi. Sementara para pelaku bisnis memerlukan data penduduk untuk keperluan rencana produksi, pemasaran, dan rekrutmen pekerja/karyawan. Dilain pihak, lembaga swasta non profit data sangat membutuhkan data ini untuk bahan analisis suatu masalah tertentu.

2.1 Piramida Penduduk

Piramida penduduk adalah ilustrasi grafis yang menggambarkan distribusi dari berbagai kelompok umur dalam populasi manusia di suatu

wilayah. Piramida penduduk digambarkan dalam dua buah diagram batang, pada satu sisi menunjukkan jumlah penduduk laki-laki dan pada sisi lainnya menunjukkan jumlah penduduk dalam kelompok interval usia penduduk lima tahunan.

Piramida penduduk sering dipandang sebagai cara yang paling efektif untuk ilustrasi grafis yang menggambarkan usia dan distribusi jenis kelamin penduduk. Berdasarkan gambar piramida penduduk tersebut, secara sekilas dapat mengetahui struktur umur penduduk dan implikasinya terhadap tuntutan pelayanan kebutuhan dasar penduduk (baik balita, remaja, dewasa, laki-laki dan perempuan, dan lansia) sekaligus melihat potensi tenaga kerja serta membayangkan kebutuhan akan tambahan kesempatan kerja yang harus diciptakan.



Sumber: Proyeksi Penduduk Kab/Kota di Indonesia 2010-2020

Gambar 2.1 Piramida Penduduk Kabupaten Soppeng Tahun 2016

Gambar 2.1 merupakan piramida penduduk Kabupaten Soppeng yang berbentuk granat dengan sebagian penduduknya berada dalam kelompok umur produktif dan mulai terjadi penurunan angka kelahiran dalam beberapa tahun terakhir, terlihat bahwa lebar bagian piramida untuk kelompok umur 0-4 dan 5-9 berkurang.

Selain itu dapat dilihat bahwa untuk kelompok umur penduduk 20-24 dan 25-29 lebar dari diagram batangnya menyempit. Penduduk Kabupaten Soppeng pada kelompok umur tersebut cenderung bermigrasi ke luar Kabupaten Soppeng untuk berbagai alasan seperti sekolah dan bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa *net migrant* bernilai negatif yang artinya bahwa lebih banyak penduduk yang bermigrasi keluar dibanding penduduk yang masuk ke Kabupaten Soppeng.

Dari piramida penduduk Kabupaten Soppeng juga terlihat pada kelompok umur 60 lebih diagram batangnya masih cukup lebar. Ini menandakan jumlah penduduk lansia yang cukup besar. Selain itu, kelompok umur 75 tahun lebih pada piramida penduduk Kabupaten Soppeng terlihat bahwa diagram batang untuk perempuan lebih lebar dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini mengindikasikan angka harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan angka harapan hidup laki-laki.

2.2 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Tahun 2016, penduduk Kabupaten Soppeng kurang lebih berjumlah 226.305 orang. Jumlah tersebut terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 106.484 orang (47,05 persen) dan penduduk perempuan sebanyak 119.821 orang (52,95 persen).

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk, Rasio Jenis Kelamin, dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2016

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin	Laju Pertumbuhan Penduduk
	Laki-Laki	Perempuan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2012	105878	119302	225180	89	
2013	106111	119401	225512	89	0,15
2014	106206	119503	225709	89	0,09
2015	106391	119725	226116	89	0,18
2016	106848	119821	226305	89	0,08

Sumber: Proyeksi Penduduk Kab/Kota di Indonesia 2010-2020

Salah satu indikator kependudukan yang dapat menggambarkan komposisi penduduk menurut jenis kelamin yaitu rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin merupakan perbandingan jumlah penduduk laki-laki per 100 orang penduduk perempuan. Berdasarkan tabel 2.1, rasio jenis kelamin Kabupaten Soppeng pada tahun 2016 adalah 89. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2016, dari 100 orang penduduk perempuan yang ada di Kabupaten Soppeng terdapat sekitar 89 orang penduduk laki-laki.

Penduduk Kabupaten Soppeng tersebar di delapan kecamatan. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Lalabata yakni sebesar 44.845 orang, sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Citta yakni sebesar 8.094 orang. Berdasarkan tabel 2.2, secara umum rasio jenis kelamin untuk masing-masing kecamatan berada di bawah 100 yang artinya setiap kecamatan memiliki jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Adapun kecamatan dengan rasio jenis kelamin terbesar adalah Kecamatan Lalabata yakni sebesar 94 sedangkan

Kecamatan Citta memiliki rasio jenis kelamin terkecil yakni sebesar 82. Hal ini berarti bahwa terdapat 94 orang penduduk laki-laki dari 100 orang penduduk perempuan di Kecamatan Lalabata dan terdapat 82 orang penduduk laki-laki dari 100 orang penduduk perempuan di Kecamatan Citta.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Soppeng Tahun 2016

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk(Orang)			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Marioriwawo	20.797	23.994	44.791	87
2	Lalabata	21.666	23.179	44.845	94
3	Liliriaja	12.836	14.394	27.230	89
4	Ganra	5.228	6.213	11.441	84
5	Citta	3.643	4.451	8.094	82
6	Lilirilau	18.012	20.624	38.636	87
7	Donri-Donri	10.825	12.321	23.146	88
8	Marioriawa	13.477	14.645	28.122	92
Soppeng		106.484	119.821	226.305	89

Sumber: Soppeng Dalam Angka 2017

2.3 Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Penduduk Kabupaten Soppeng pada tahun 2016 yang berjumlah sekitar 226.305 orang tersebar di 8 kecamatan. Berdasarkan Gambar 2.2, dapat dilihat bahwa persebaran penduduk di Kabupaten Soppeng tidak merata. Marioriwawo, Lalabata, dan Lilirilau merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar. Sebanyak 19,82 persen penduduk Kabupaten Soppeng tinggal di Kecamatan Lalabata, 19,79 di Kecamatan Marioriwawo, sedangkan 17,07 persen penduduk tinggal di Kecamatan Lilirilau. Adapun

sisanya, yaitu 43,32 persen tersebar di 5 kecamatan lainnya (Liliriaja, Ganra, Citta, Donri-Donri, dan Marioriawa).



Sumber: Soppeng dalam Angka 2017

Gambar 2.2 Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Soppeng Tahun 2016

Perbedaan distribusi penduduk dan persentase luas wilayah di setiap kecamatan mengakibatkan kepadatan penduduk setiap kecamatan juga berbeda-beda. Secara keseluruhan kepadatan penduduk di Kabupaten Soppeng pada tahun 2015 yaitu sekitar 151 orang perkilometer persegi. Kecamatan yang terpadat penduduknya adalah Kecamatan Liliriaja dengan kepadatan penduduk mencapai 284 orang perkilometer persegi, sedangkan kecamatan dengan kepadatan terendah yaitu Kecamatan Marioriawa dengan kepadatan sekitar 88 orang perkilometer persegi.

**Tabel 2.3 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di
Kabupaten Soppeng Tahun 2016**

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk (orang/km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Marioriwawo	300	149
2	Lalabata	278	161
3	Liliriaja	96	284
4	Ganra	57	201
5	Citta	40	202
6	Lilirilau	187	207
7	Donri-Donri	222	104
8	Marioriawa	320	88
Soppeng		1500	151

Sumber: Soppeng dalam Angka 2017

Di negara yang sedang berkembang, kepadatan penduduk yang cepat akan dapat mendorong perkembangan ekonomi apabila kapital dan kemampuan managerial termasuk organisasi dan administrasi dapat mengimbangi tantangan penduduk tersebut. Akan tetapi, seperti diketahui bersama bahwa semakin padat penduduk di suatu wilayah, maka akan diikuti oleh peningkatan permintaan akan kebutuhan hidup oleh penduduk itu sendiri. Apabila permintaan tidak seimbang dengan dengan produksi kebutuhan penduduk maka akan berdampak pada ketimpangan sosial ekonomi dalam masyarakat. Oleh karena itu, persebaran penduduk baik dari segi kuantitas maupun kualitas perlu mendapat perhatian yang serius demi optimalisasi dan pemerataan hasil pembangunan.

2.4 Kelompok Usia dan Jenis Kelamin

Salah satu indikator kependudukan yang sangat penting adalah komposisi atau struktur penduduk. Komposisi atau struktur penduduk dapat dilihat dari jenis kelamin dan dapat pula dilihat dari struktur umur serta kombinasi antara keduanya. Keduanya memiliki arti strategis dalam hubungannya dengan berbagai aspek kependudukan lainnya seperti fertilitas, mortalitas, migrasi dan masalah-masalah ketenagakerjaan. Indikator ini dapat digunakan untuk memprioritaskan kebijakan yang perlu diambil dalam suatu wilayah tertentu.

Komposisi penduduk menurut kelompok usia dapat menggambarkan tinggi atau rendahnya tingkat kelahiran dan dapat mencerminkan Angka Beban Ketergantungan (ABK) atau *dependency ratio*. ABK merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) dengan penduduk usia tidak produktif (usia di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas). ABK dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar menunjukkan keadaan ekonomi suatu wilayah.

Pada tahun 2016, penduduk Kabupaten Soppeng yang berusia muda (0-14 tahun) berjumlah 54.594 orang. Jumlah tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 55.262 orang. Penurunan ini mengindikasikan bahwa terjadi penurunan angka kelahiran dalam satu tahun tersebut. Adapun jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Kabupaten Soppeng sebesar 148.876 orang pada tahun 2016 mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun 2015 yang hanya berjumlah 148.362 orang. Penduduk usia tua (65 tahun ke atas) pada tahun 2016 tercatat juga mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya yakni menjadi 22.835 orang.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa ABK penduduk Kabupaten Soppeng sebesar 52,01 pada tahun 2016 mengalami penurunan dari tahun 2015 yang mencapai angka 52,41. Angka 52,01 menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 52-53 orang yang belum produktif (penduduk usia 0-

14 tahun) dan dianggap tidak produktif lagi (penduduk berusia lebih dari 65 tahun).

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Angka Beban Ketergantungan (ABK) di Kabupaten Soppeng Tahun 2015 dan 2016

Indikator	2015	2016
(1)	(2)	(3)
Jumlah penduduk	226 116	226 116
0-14	55.262	54.594
15-64	148.362	148.876
65+	22.492	22.835
Penduduk lansia (60+) (%)	14,85	15,10
ABK	52,41	52,01

Sumber: Proyeksi Penduduk Kab/Kota di Indonesia 2010-2020

Beberapa ahli demografi menyatakan bahwa suatu wilayah yang angka ketergantungan dibawah 50 maka wilayah tersebut masuk pada fase bonus demografi. Bonus Demografi merupakan suatu fenomena dimana struktur penduduk sangat menguntungkan bagi pembangunan dikarenakan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) jauh lebih besar dari jumlah penduduk usia muda (0-14 tahun) dan usia tua (65 tahun ke atas). Hingga tahun 2016, penduduk Kabupaten Soppeng belum sampai pada fase bonus demografi tersebut.

Berdasarkan piramida penduduk Kabupaten Soppeng tahun 2016 yang dipaparkan sebelumnya, terlihat pada kelompok usia 60 tahun lebih diagram batangnya masih cukup lebar yang artinya jumlah penduduk lansia masih cukup besar. Suatu wilayah dikatakan masuk dalam kategori *aging population* jika penduduk usia 60 tahun lebih berjumlah lebih dari 10 persen. Kabupaten Soppeng sudah masuk dalam fase *aging population* sejak tahun

2010 dengan persentase usia lansia mencapai 13,39 persen, bahkan pada tahun 2016 sudah mencapai 15,10 persen. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Soppeng harus menyiapkan segala kebijakan dan fasilitas untuk menghadapi banyaknya penduduk pada kelompok ini.

2.5 Status Perkawinan

Salah satu karakteristik penduduk yang berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi yaitu status perkawinan. Penduduk menurut status perkawinan dapat dibedakan menurut dua kelompok yaitu belum kawin dan pernah kawin. Pernah kawin meliputi mereka yang kawin, cerai hidup dan cerai mati. BPS mendefinisikan penduduk yang berstatus kawin yaitu penduduk yang berada dalam ikatan perkawinan baik secara hukum adat, agama, negara dan sebagainya, maupun mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat dianggap sebagai suami istri.

Berdasarkan tabel 2.5, terlihat bahwa penduduk Kabupaten Soppeng yang berusia 10 tahun ke atas pada tahun 2016 sebagian besar berstatus kawin yakni sebesar 58,75 persen. Sementara yang berstatus belum kawin sebanyak 29,18 persen dan sisanya sebesar 12,06 persen berstatus cerai (cerai hidup dan cerai mati).

Apabila dilihat dari jenis kelamin, persentase penduduk laki-laki sebesar 33,29 persen berstatus belum kawin lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perempuan berstatus belum kawin yang hanya mencapai 25,64 persen dari total penduduk Kabupaten Soppeng yang berusia 10 tahun ke atas dan berstatus belum kawin. Hal ini dapat dikarenakan sebagian besar laki-laki berpikir untuk bertanggung jawab dalam mencari nafkah sehingga dapat menunda usia pernikahan. Walaupun demikian, ternyata dari total penduduk yang berstatus kawin, persentase penduduk laki-laki yang kawin yakni 61,96 persen juga lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perempuan yang kawin yakni 55,99 persen. Kondisi ini dapat disebabkan karena perempuan umumnya lebih cenderung tahan

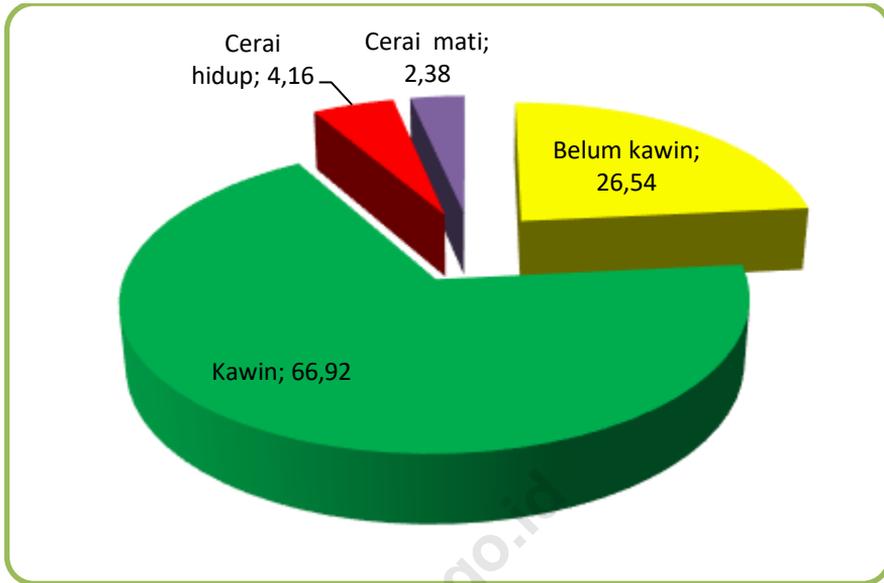
untuk tidak kembali menikah setelah berstatus cerai (cerai mati atau cerai hidup) dibandingkan laki-laki yang cenderung akan menikah lagi.

Tabel 2.5 Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan Tahun 2016 di Kabupaten Soppeng

Status Kawin	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Belum kawin	33,29	25,64	29,18
Kawin	61,96	55,99	58,75
Cerai hidup	2,42	3,45	2,97
Cerai mati	2,34	14,91	9,09
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Soppeng Dalam Angka Tahun 2017

Terdapat 68,92 persen wanita dari total wanita usia 15-49 tahun di Kabupaten Soppeng pada tahun 2016 yang berstatus kawin. Usia 15-49 tahun merupakan usia subur, artinya adalah usia produktif untuk menghasilkan keturunan. Diperlukan kesadaran yang tinggi untuk mengatur jumlah anak dan jarak kelahiran anak yang secara tidak langsung dapat menekan laju pertumbuhan penduduk. Peran pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kesehatan sangat penting terutama dalam hal membantu para ibu dalam mengikuti program Keluarga Berencana.



Sumber: Survei Ekonomi Nasional Tahun 2016

Gambar 2.3 Persentase Wanita 15-49 Tahun Menurut Status Perkawinan di Kabupaten Soppeng Tahun 2016

BAB III

FERTILITAS DAN KB

Fertilitas dalam demografi didefinisikan sebagai kemampuan seorang wanita untuk menghasilkan anak lahir hidup. Fertilitas (kelahiran) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk selain mortalitas (kematian) dan migrasi (pindahan). Fertilitas dapat dipengaruhi oleh keadaan dari wanita itu sendiri yakni secara kodrati wanitalah yang mengalami reproduksi. Keadaan wanita tersebut diantaranya ditinjau dari usia, tingkat pendidikan, usia perkawinan pertama, penggunaan alat kontrasepsi dan lain-lain. BPS membatasi pada wanita pernah kawin berusia 15 hingga 49 tahun dikarenakan usia tersebut merupakan usia subur bagi seorang wanita sehingga kemungkinan seorang wanita dapat melahirkan anak cukup besar dalam rentang usia tersebut.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengendalikan tingkat fertilitas diantaranya pemberian batasan usia pernikahan dan program Keluarga Berencana (KB). Pemberian batasan usia tersebut dimaksudkan agar wanita menunda usia perkawinan mereka sehingga dapat memperpendek masa reproduksinya.

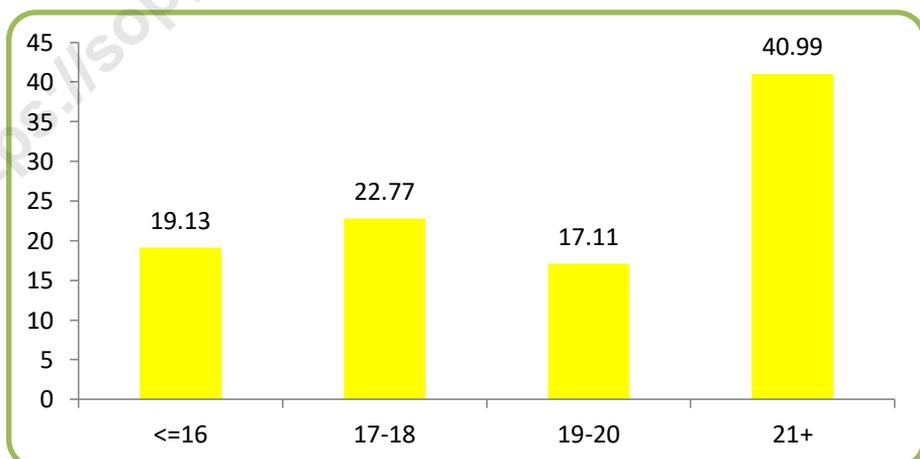
Perempuan yang kawin pada usia yang terlalu muda cenderung beresiko lebih tinggi selama masa kehamilan dan persalinan dibandingkan dengan wanita yang sudah berada pada usia matang (lebih dari 20 tahun). Resiko selama kehamilan dan persalinan akan berdampak pada kesehatan ibu dan anak. Selain itu, dengan menunda usia kawin diharapkan wanita dapat memiliki kesempatan untuk bersekolah lebih tinggi atau pun bekerja sehingga memiliki bekal yang cukup, baik material maupun spiritual untuk berumah tangga kelak.

Program KB merupakan program yang dikeluarkan pemerintahan untuk membatasi jumlah kelahiran. Hal tersebut dimaksudkan agar beban

yang harus ditanggung oleh rumah tangga tidak terlampau besar atau sesuai dengan kemampuan ekonomi yang dimiliki. Jumlah anak yang terbatas juga akan sangat menguntungkan karena ibu dapat memfokuskan perhatian kepada anak-anak mereka yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup anak tersebut. Dalam jangka panjang, diharapkan dari rumah tangga yang terprogram dengan baik tersebut akan menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas untuk kelanjutan pembangunan di masa yang akan datang.

3.1 Usia Kehamilan Pertama

Usia kehamilan pertama merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingkat fertilitas, karena semakin tinggi usia kehamilan pertama, khususnya wanita menyebabkan kemungkinan masa reproduksinya lebih pendek. Hal ini juga berarti bahwa semakin muda usia seorang wanita melakukan perkawinan maka semakin panjang masa reproduksinya, yang menyebabkan kemungkinan usia kehamilan pertama juga semakin lebih muda dan semakin besar pula kemungkinannya untuk memiliki lebih banyak anak.



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2016

Gambar 3.1. Persentase Wanita Usia 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Umur Kehamilan Pertama Tahun 2016

Proporsi penduduk wanita Kabupaten Soppeng dengan usia hamil pertamanya di bawah usia 16 tahun masih cukup tinggi yakni sebesar 19,13 persen pada tahun 2016. Sementara dengan wanita pernah kawin yang usia hamil pertamanya pada usia 17-18 tahun mencapai angka 22,77 persen. Tingginya proporsi usia kehamilan pertama pada usia 18 tahun ke bawah menunjukkan bahwa menimbulkan spekulasi bahwa masyarakat di Kabupaten Soppeng masih memiliki budaya malu apabila ada anak perempuannya yang belum menikah, terlebih anak perempuan yang sudah tidak duduk di bangku sekolah lagi sehingga banyak yang dijodohkan atau dinikahkan meskipun usianya masih terlalu muda. Kemungkinan lain yaitu dari segi ekonomi dimana muncul anggapan bahwa dengan menikahkan anak perempuannya maka beban yang harus ditanggung oleh rumah tangga tersebut menjadi berkurang. Usia perkawinan pertama yang cukup muda tersebut secara otomatis menaikkan peluang kehamilan pada usia yang juga cukup sangat muda.

Apabila dicermati lebih seksama, ternyata sebagian besar usia kehamilan pertama terjadi pada usia di atas usia 25 tahun yakni mencapai 40,99 persen. Kondisi ini dapat disebabkan karena semakin meningkatnya kesadaran wanita akan pentingnya pendidikan sehingga banyak yang meneruskan pendidikannya sampai ke perguruan tinggi, ataupun juga memutuskan untuk bekerja sehingga dapat menunda usia perkawinan yang otomatis juga akan menunda usia kehamilan pertama. Hal-hal tersebut menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengendalikan banyaknya kelahiran meskipun relarif masih rendah karena masih banyaknya yang menikah pada usia muda.

3.2 Pemakaian Alat/Cara KB

Selain melalui penundaan usia perkawinan pertama, partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah menangani masalah kependudukan yaitu dapat berupa kesadaran masyarakat untuk

mensukseskan program Keluarga Berencana (KB). Salah satu tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera melalui pembatasan dan pengaturan jarak kelahiran. Hal ini bisa ditempuh salah satunya dengan cara pemakaian alat/cara kontrasepsi KB.

Persentase wanita kawin usia 15-49 tahun yang pernah menggunakan KB pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 60,46 persen dibandingkan tahun 2015 yang hanya mencapai 59,07 persen. Walaupun demikian, apabila diperhatikan lebih lanjut ternyata pada tahun 2016 tercatat pada pengguna KB aktif mengalami penurunan yakni hanya mencapai angka 42,11 persen dengan kondisi persentasenya lebih rendah dibandingkan dua tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesadaran serta partisipasi wanita kawin usia 15-49 tahun dalam mensukseskan program KB mengalami penurunan

Tabel 3.1 Persentase Wanita Kawin Usia 15-49 Tahun menurut Partisipasi KB di Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2016

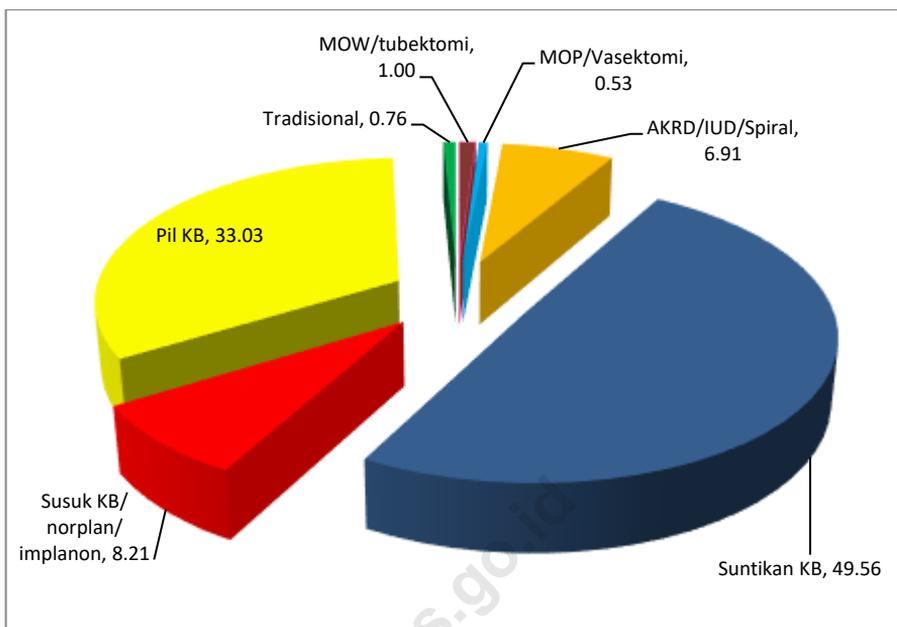
Partisipasi KB	Tahun		
	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
Pernah Memakai	73,40	59,07	60,46
Sedang memakai	49,46	43,18	42,11
Tidak pakai lagi	23,94	15,89	18,34
Tidak pernah pakai	26,60	40,94	39,54

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2014-2016

Berdasarkan cara penggunaan KB yang digunakan, sebanyak 0,76 persen akseptor pada tahun 2016 lebih memilih menggunakan cara tradisional. Cara ini dipilih karena metode tersebut sangat mudah dan memiliki risiko yang sangat kecil atau bahkan tanpa risiko.

Apabila ditinjau dari penggunaan alat kontrasepsi, secara umum akseptor aktif KB di Kabupaten Soppeng pada tahun 2016 lebih cenderung menggunakan metode kontrasepsi jangka pendek seperti suntikan dan pil yakni sebesar 82,59 persen. Sementara sisanya sebesar 16,65 persen memilih menggunakan metode jangka panjang seperti implan, IUD, dan MOW/MOP.

Penggunaan metode kontrasepsi terbanyak yaitu dengan menggunakan suntikan KB. Sebanyak 46,56 persen akseptor aktif KB di Kabupaten Soppeng pada tahun 2016 menggunakan metode kontrasepsi ini. Selanjutnya alat kontrasepsi kedua yang paling banyak digunakan adalah penggunaan pil KB yakni sebesar 33,03 persen. Kedua metode ini memiliki persentase yang paling besar dibanding metode lainnya karena metode ini relatif jauh lebih mudah dari segi cara pemakaiannya, termasuk apabila akseptor ingin berhenti menggunakannya maka pemberhentian tersebut dapat dilakukan kapanpun sesuai yang dikehendaki oleh akseptor. Terlebih lagi kedua metode tersebut juga relatif lebih murah dan mudah didapatkan. Selain itu, risiko terjadinya kelainan relatif juga lebih kecil dibanding metode kontrasepsi lainnya.



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2016

Gambar 3.2 Persentase Akseptor Aktif KB Menurut Metode Kontrasepsi yang digunakan di Kabupaten Soppeng Tahun 2016

Kemudian sisanya, 8,21 persen menggunakan implan, 6,91 persen menggunakan metode IUD, dan hanya 1,53 persen yang menggunakan metode MOW/MOP. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai metode jangka panjang ini dan biayanya yang relatif mahal membuat metode ini digunakan oleh beberapa akseptor KB saja.

BAB IV

PENDIDIKAN

Kedudukan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pembangunan saat ini bukan hanya sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga sebagai sasaran pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, pembangunan fisik tidak dapat meninggalkan pembangunan manusia sebagai mesin penggerakannya. Kualitas SDM yang tersedia menentukan tingkat apresiasi dan partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan yang dicanangkan bersama. Cara utama untuk meningkatkan kualitas SDM adalah melalui pendidikan berkualitas, berkesinambungan dan merata.

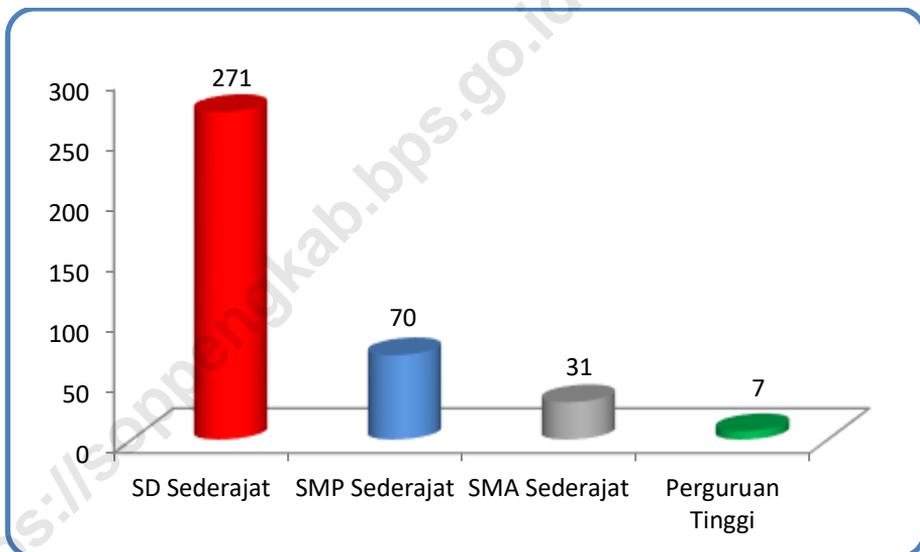
Pendidikan merupakan kebutuhan dan usaha dasar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Pendidikan harus menjadi stimulus bagi manusia untuk meningkatkan taraf hidupnya sendiri yang pada akhirnya secara makro akan meningkatkan perekonomian maupun ketahanan nasional. Sedemikian penting pendidikan sehingga UUD 1945 mengamanatkan anggaran untuk bidang pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan 20 persen dari APBD.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Soppeng sangat konsisten dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Arah kebijakan peningkatan perluasan dan pemerataan pendidikan dilaksanakan melalui antara lain penyediaan fasilitas layanan pendidikan berupa pembangunan unit sekolah baru, penambahan ruang kelas dan penyediaan fasilitas pendukungnya, penyediaan berbagai alternatif pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus, serta penyediaan berbagai beasiswa dan bantuan dana operasional sekolah yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan melibatkan peran aktif masyarakat.

Bab ini menyajikan secara umum keadaan pendidikan di Kabupaten Soppeng dari beberapa indikator diantaranya rasio murid-sekolah, rasio murid-guru, partisipasi sekolah, angka melek huruf, dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

4.1. Sarana Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk sangat ditentukan oleh sarana yang tersedia. Jumlah sarana pendidikan yang memadai dan kemudahan untuk mengaksesnya akan mendukung penduduk untuk menyelesaikan pendidikan sampai tingkat tertinggi.



Sumber : Soppeng Dalam Angka 2017

Gambar 4.1 Jumlah Sarana Pendidikan Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Soppeng Tahun 2016

Pada tahun ajaran 2016, di Kabupaten Soppeng terdapat 271 sekolah pendidikan dasar yang terdiri atas 252 unit Sekolah Dasar dan 19 unit Madrasah Ibtidaiyah (MI). Jumlah sekolah tingkat menengah pertama (SMP)/sederajat yaitu sebanyak 70 sekolah, terdiri atas 38 unit SMP dan 32 Unit Madrasah Tsanawiyah (MTS). Sementara itu, jumlah sekolah tingkat

Sekolah Menengah Atas (SMA) / sederajat yaitu sebanyak 31 sekolah, terdiri atas 12 unit SMA, 12 unit SMK dan 7 Madrasah Aaliyah (MA).

Pada tahun ini, Kabupaten Soppeng telah memiliki 7 perguruan tinggi dengan berbagi jurusan dan program studi pada tingkat D3 dan S1. Perguruan tinggi tersebut antara lain STAI Al-Gazali, STISIPOL Petta Baringeng, STMIK Lamappapoleonro, STIE Lamappapoleonro, AMIK Lamappapoleonro, AKPER Putra Pertiwi dan AKBID Menara Prima. Banyaknya perguruan tinggi yang ada merupakan salah satu faktor penunjang yang dapat meningkatkan kualitas penduduk Kabupaten Soppeng.

4.1.1 Indikator Daya Tampung Sekolah

Rasio Murid Sekolah (RMS) pada setiap tingkat pendidikan diperoleh dengan membandingkan jumlah murid dengan jumlah sekolah. RMS menggambarkan rata-rata banyaknya murid pada setiap sekolah dalam setiap tingkat pendidikan. Rasio ini diperlukan untuk mengetahui kepadatan murid pada setiap sekolah yang salah satu kegunaannya adalah untuk melihat perlu atau tidaknya menambah gedung sekolah di suatu wilayah.

Besarnya rasio murid sekolah pada setiap tingkat pendidikan sekolah menunjukkan adanya indikasi semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya. Hal ini tentunya sangat beralasan sekali karena hampir seluruh aspek kehidupan memerlukan pendidikan yang memadai.

RMS untuk tingkat pendidikan SD/ sederajat mengalami penurunan. Jika pada tahun ajaran 2015/2016 nilai RMS untuk tingkat SD/ sederajat adalah 81,28, maka pada tahun 2016/2017 turun menjadi 80,74. Hal ini disebabkan oleh penurunan jumlah murid pada jenjang pendidikan tersebut. Sementara pada jenjang pendidikan SMP/sederajat dan SMA/sederajat, RMS juga mengalami penurunan dibandingkan tahun ajaran sebelumnya. Pada

tahun ajaran 2015/2016, RMS untuk tingkat SMP/ sederajat sebesar 172,41 turun menjadi 166,86 untuk tahun ajaran 2016/2017. Pada tingkat SMA/ sederajat, RMS tahun ajaran 2015/2016 sebesar 310,35 turun menjadi 303,26 untuk tahun ajaran 2016/2017. Hal ini mengindikasikan semakin rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya sampai tingkat sekolah menengah.

Tabel 4.1 Jumlah Sekolah, Murid dan Rasio Murid Terhadap Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Soppeng Tahun Ajaran 2015/2016 dan 2016/2017

Jenjang Pendidikan	2015/2016			2016/2017		
	Jumlah Murid	Jumlah Sekolah	Rasio Murid Terhadap Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Sekolah	Rasio Murid Terhadap Sekolah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SD/Sederajat	22 433	272	81,28	21 881	271	80,74
SMP/Sederajat	11 724	71	172,41	11 680	70	166,86
SMA/Sederajat	9 621	31	310,35	9 401	31	303,26

Sumber : Soppeng Dalam Angka 2016 dan 2017

4.1.2 Indikator Kecukupan Tenaga Pendidik

Selain dari sarana yang memadai, hasil kualitas pendidikan juga ditentukan oleh proses yang dijalani. Proses pendidikan akan berjalan baik apabila interaksi antara murid dan guru berjalan lancar. Apabila jumlah murid yang dibimbing oleh seorang guru terlalu banyak, maka interaksi dan komunikasi yang terjalin akan kurang maksimal. Rasio Murid-Guru (RMG) merupakan indikator yang dapat menggambarkan beban kerja seorang guru dalam mengajar dan untuk melihat mutu pengajaran di kelas.

. RMG pada tingkat pendidikan SD/ sederajat pada tahun ajaran 2016/2017 yaitu 8,29. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap guru

mengajar sekitar 8 sampai dengan 9 murid pada tingkat SD untuk tahun ajaran 2016/2017. Pada tahun ajaran yang sama, untuk tingkat SMP/ sederajat setiap guru mengajar sekitar 8 murid, sedangkan pada tingkat SMA/ sederajat, setiap guru mengajar sekitar 8 sampai 9 orang murid.

Tabel 4.2 Jumlah Murid, Guru dan Rasio Murid Terhadap Guru menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Soppeng Tahun Ajaran 2015/2016 dan 2016/2017

Jenjang Pendidikan	2015/2016			2016/2017		
	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid Terhadap Guru	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid Terhadap Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SD/sederajat	22 433	2 640	8,50	21 881	2 640	8,29
SMP/sederajat	11 724	1 460	8,03	11 680	1 460	8,00
SMA/sederajat	9 621	1 139	8,45	9 401	1 047	8,98

Sumber : Soppeng Dalam Angka 2016 dan 2017

Secara umum, pada tahun ajaran 2016/2017 menunjukkan bahwa RMG pada masing-masing tingkat pendidikan mengalami penurunan dibandingkan tahun ajaran 2015/2016. Artinya, beban kerja guru dalam mengawasi anak didiknya lebih sedikit dibandingkan tahun ajaran sebelumnya. Sayangnya belum ada literatur yang menetapkan ukuran standar untuk rasio ini sehingga tidak dapat dikatakan apakah nilai RMG pada tabel di atas sudah ideal atau belum.

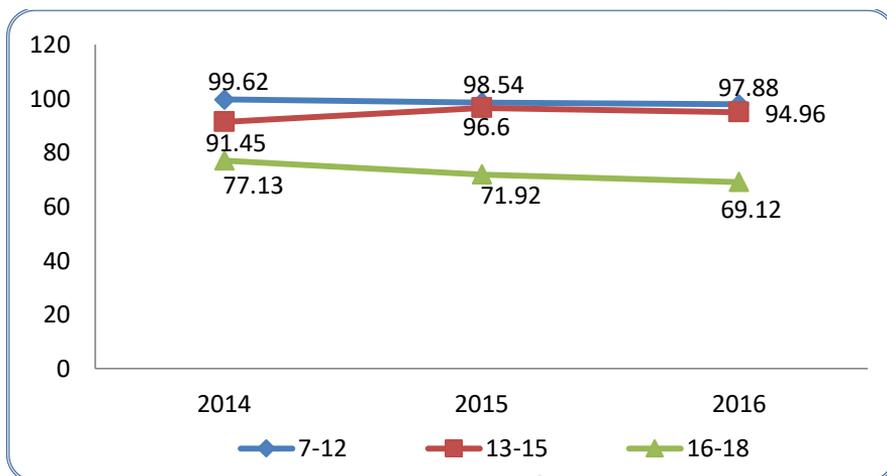
4.2 Partisipasi Sekolah

Memperoleh pendidikan merupakan hak setiap warga negara sebagaimana tercantum dalam undang-undang dasar. Dalam mengemban

amanat UUD 1945 tersebut, disertai kesadaran akan pentingnya pendidikan, pemerintah pusat dan daerah senantiasa berupaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia. Berbagai program dicanangkan antara lain Gerakan Wajib (Wajib Belajar) 9 Tahun, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Beasiswa Bidik Misi. Untuk mengetahui keberhasilan program-program tersebut, dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Putus Sekolah (APTS).

4.2.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. APS mempunyai keunggulan dapat mencerminkan partisipasi/akses pendidikan sesuai kelompok usia sekolah sehingga jelas menggambarkan seberapa besar penduduk yang sedang menikmati pendidikan. Akan tetapi, kelemahan APS adalah tidak dapat melihat di jenjang apa seseorang tersebut bersekolah/menikmati pendidikan.



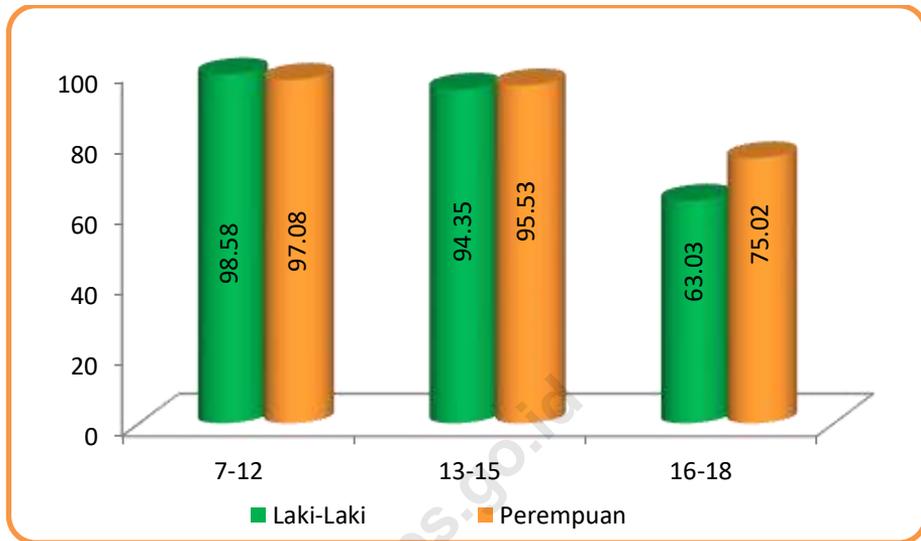
Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2014-2016

Gambar 4.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2016

Secara keseluruhan, APS pada tahun 2016 di Kabupaten Soppeng mengalami penurunan untuk sebagian besar kelompok umur dibandingkan tahun 2014 dan 2015. Nilai APS untuk kelompok umur 7-12 tahun pada tahun 2016 sebesar 97,88 persen lebih rendah dibandingkan tahun 2014 sebesar 99,62 persen dan tahun 2015 sebesar 98,54 persen, sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah lebih lanjut agar nilainya dapat terus meningkat untuk tahun-tahun mendatang, karena pada kelompok umur tersebut erat kaitannya dengan pendidikan dasar dan kesuksesan program Wajib Belajar 9 tahun.

Penurunan nilai APS terjadi seiring dengan semakin tingginya kelompok usia. Hal ini menunjukkan bahwa peluang untuk mengakses pendidikan semakin kecil seiring semakin tingginya tingkat pendidikan. Selain itu, disebabkan pula karena adanya pertimbangan sebagian masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Pertimbangan tersebut kemungkinan karena di satu sisi biaya pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi relatif lebih mahal, sementara disisi lain kebutuhan rumah tangga semakin meningkat sehingga anaknya lebih cenderung diikutkan dalam kegiatan bekerja atau membantu mencari

pendapatan/penghasilan.



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2016

Gambar 4.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Soppeng Tahun 2016

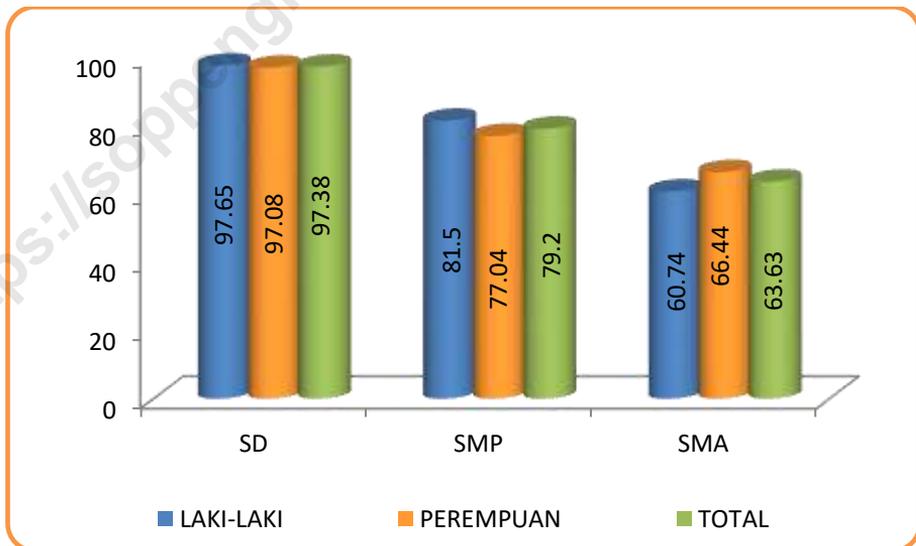
Menurut jenis kelamin, APS perempuan tahun 2016 lebih tinggi dibandingkan APS laki-laki untuk sebagian besar kelompok umur, yakni pada kelompok umur 13-15 tahun dan 16-18 tahun. Pada kelompok umur 7-12 tahun, APS laki-laki lebih tinggi dibandingkan APS perempuan di tahun 2016 dengan perbedaan sekitar 1,5 persen.

4.2.2 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi anak sekolah kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap seluruh anak pada kelompok usia tersebut. APM juga bisa digunakan untuk melakukan kajian di ketiga jenis jenjang pendidikan yaitu jenjang SD, SMP, dan SMA. Manfaat dari angka ini adalah untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat pada waktunya. Selain

itu, APM juga dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan usia pada jenjang pendidikannya.

Pada tahun 2016, APM untuk jenjang pendidikan SD tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dilihat dari jenis kelaminnya. APM SD secara keseluruhan mencapai angka 97,38 yang artinya sebanyak 97,38 anak sekolah SD menunjukkan kesesuaian dengan penduduk usia 7-12 tahun yang sedang duduk di bangku SD. Sementara untuk jenjang pendidikan SMP dan SMA apabila dilihat dari jenis kelaminnya, tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antara APM penduduk jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Dengan kata lain, perhatian dan wawasan masyarakat tentang pendidikan sudah mulai terbuka. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak lagi menjadi penghalang dalam menuntut pendidikan atau berarti kesempatan bersekolah sudah terbuka lebar bagi siapapun.

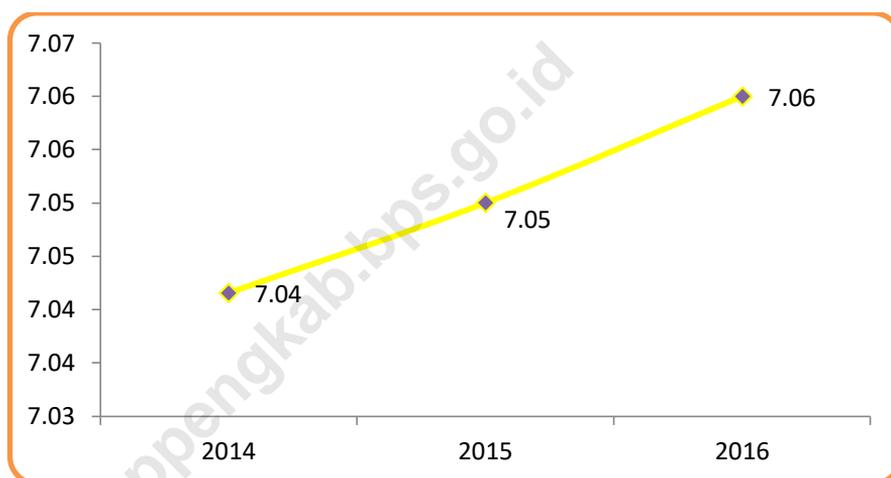


Sumber : Indikator Pendidikan Provinsi Sulsel Tahun 2016

Gambar 4.4 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Soppeng Tahun 2016

4.3 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Salah satu indikator dampak yang merupakan komponen dalam penghitungan IPM dari segi pencapaian pendidikan selain Angka Melek Huruf (AMH) adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dapat memberikan informasi tentang sejauh mana tingkat pendidikan yang dicapai oleh penduduk dewasa. Semakin lama rata-rata lama sekolah penduduk, maka semakin baik juga tingkat pendidikan penduduk tersebut.



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

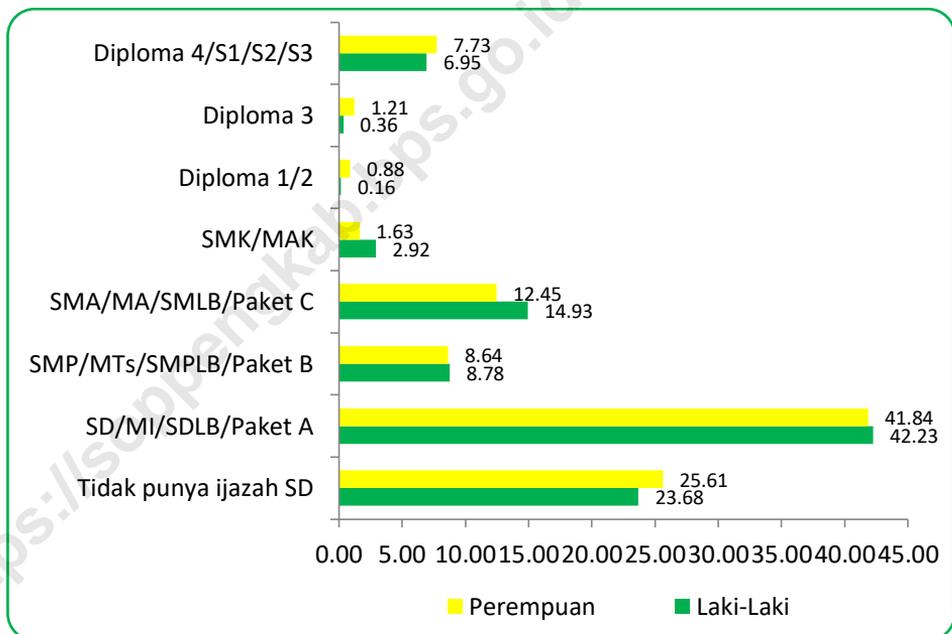
Gambar 4.5 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2016

Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Soppeng menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan tersebut tidak signifikan baik secara angka maupun interpretasinya. Pada tahun 2016, RLS penduduk di Kabupaten Soppeng 7,06. Hal tersebut berarti rata-rata penduduk di Kabupaten Soppeng hanya mengenyam pendidikan di bangku sekolah selama 7 sampai 8 tahun atau apabila dikonversikan ke pendidikan formal, rata-rata kurang lebih tamat SD/ sederajat sampai tahun kedua bangku SLTP/ sederajat. Gambar 4.5 mengandung pengertian bahwa pada tahun 2014 hingga tahun 2016 rata-rata penduduk di Kabupaten Soppeng

mengenyam pendidikan hanya sampai tahun pertama hingga tahun kedua sekolah menengah pertama.

4.4 Tingkat Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan

Tingkat pendidikan yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, semakin baik kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, potensi sumber daya manusia di suatu wilayah dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan.



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2016

Gambar 4.6 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki di Kabupaten Soppeng Tahun 2016

Pada tahun 2016, sebagian besar penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Soppeng telah menamatkan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar. Gambar 4.6 menunjukkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan

sebagian besar penduduk Kabupaten Soppeng adalah pada jenjang SD/ sederajat yaitu sebanyak 41,84 persen pada perempuan dan 42,23 persen pada laki-laki. Penduduk yang tidak/belum tamat pendidikan dasar merupakan kelompok terbanyak kedua dengan persentase sekitar 25,61 persen untuk perempuan dan 23,68 persen untuk laki-laki.

Apabila dilihat menurut jenis kelamin, persentase penduduk perempuan yang tamat perguruan tinggi (DI/ DII/ DIII/ DIV/ S1/ S2/ S3) lebih tinggi daripada penduduk laki-laki pada tahun 2016. Padahal apabila diamati persentase penduduk perempuan yang tamat SMA/ sederajat masih lebih rendah dibandingkan penduduk laki-laki. Hal ini dapat disebabkan penduduk laki-laki cenderung lebih memilih untuk langsung mencari pekerjaan setelah tamat dari bangku sekolah menengah atas untuk membantu menambah penghasilan keluarga.

BAB V

KESEHATAN

Kondisi kesehatan memberikan pengaruh yang besar bagi kualitas sumber daya manusia (SDM) pada umumnya. Gambaran tersebut secara nyata dapat diperoleh dari potret kegiatan masyarakat sehari-hari. Seseorang yang mempunyai badan sehat akan dapat melakukan kegiatan dan aktivitas sehari-hari dengan lebih baik dan optimal dibandingkan bila kesehatannya sedang terganggu. Oleh karena itu, kesehatan merupakan salah satu faktor penting bagi setiap manusia yang akan mempengaruhi kualitas kehidupannya.

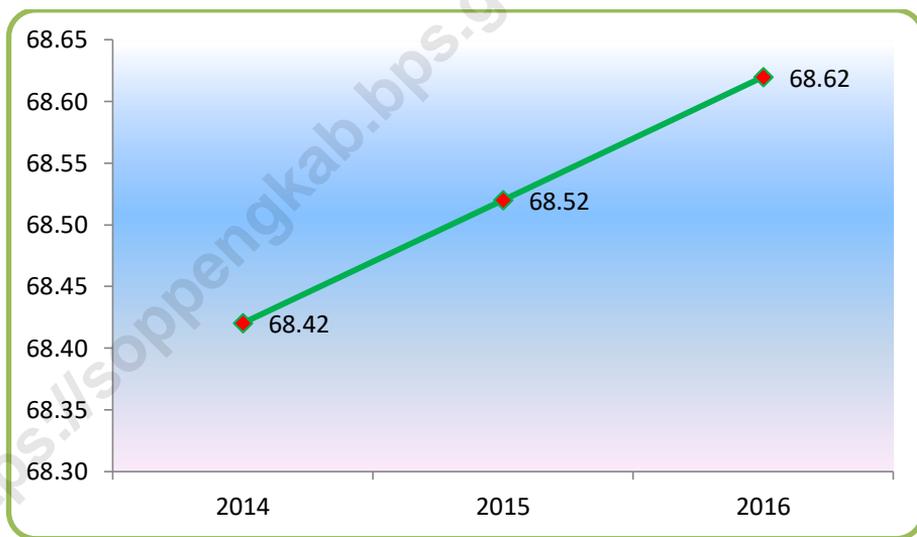
Tingkat kesehatan penduduk berkaitan dengan tingkat kesejahteraannya sehingga pembangunan di bidang kesehatan merupakan bagian dari pembangunan di bidang kesejahteraan. Pembangunan dalam bidang kesehatan antara lain bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah, dan merata. Melalui upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Berbagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sudah banyak dilakukan oleh pemerintah selama ini, antara lain dengan memberikan penyuluhan kesehatan agar semua anggota keluarga berperilaku hidup sehat serta penyediaan berbagai fasilitas umum seperti puskesmas, posyandu, pondok bersalin desa (polindes) dan masih banyak lagi. Keberhasilan pembangunan dalam bidang kesehatan akan berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan bidang yang lain.

5.1 Derajat Kesehatan Masyarakat

Derajat kesehatan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dalam bidang kesehatan. Dengan adanya derajat kesehatan, akan tergambar masalah kesehatan yang sedang dihadapi suatu wilayah. Ada beberapa

faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, antara lain faktor keturunan/genetis, pelayanan kesehatan, perilaku, dan lingkungan.

Angka Harapan Hidup (AHH) disebut juga lama hidup seseorang/sekelompok orang yang digunakan sebagai acuan dalam perencanaan program-program kesehatan. Selain itu, AHH merupakan suatu alat evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. AHH yang rendah di suatu wilayah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori, termasuk program pemberantasan kemiskinan.



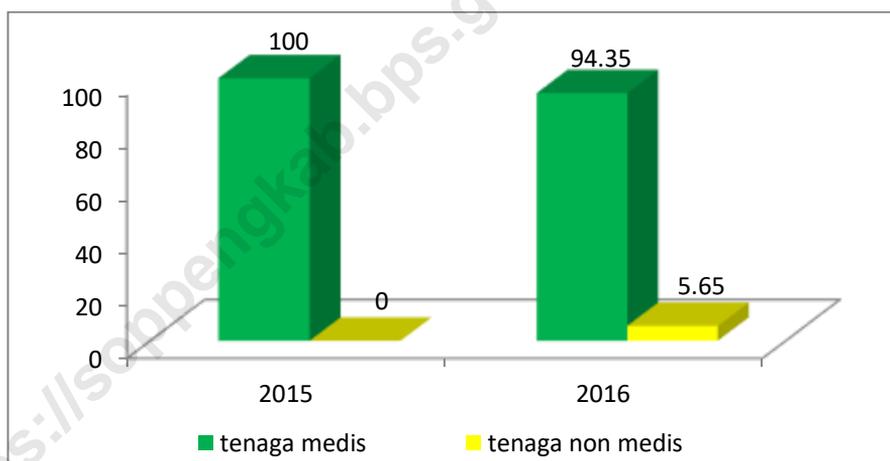
Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 5.1 Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2016

AHH Kabupaten Soppeng pada dalam rentang tahun 2014-2016 menunjukkan tren naik. Pada tahun 2014, AHH menunjukkan nilai 68,42 meningkat menjadi 68,62 pada tahun 2016. Hal tersebut dapat diartikan bahwa rata-rata lama hidup penduduk Kabupaten Soppeng sampai meninggal yaitu antara usia 68 sampai 69 tahun. Walaupun interpretasi

angka tersebut tidak berubah signifikan, tetapi naiknya angka AHH dalam tiga tahun terakhir telah mengindikasikan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Soppeng.

AHH pada saat seseorang lahir diartikan sebagai perkiraan lama hidup rata-rata bayi baru lahir dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas sepanjang hidupnya. AHH saat lahir dipengaruhi oleh tingkat kematian bayi dan anak karena kematian pada saat itu berarti hilangnya peluang untuk hidup yang lebih panjang. Semakin rendah tingkat kematian bayi, maka semakin tinggi AHH. Untuk menekan angka kematian bayi, diperlukan penolong persalinan yang memadai untuk menjamin proses persalinan yang aman dan benar.



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2015-2016

Gambar 5.2 Persentase Persalinan Menurut Penolong Persalinan Pertama di Kabupaten Soppeng Tahun 2015-2016

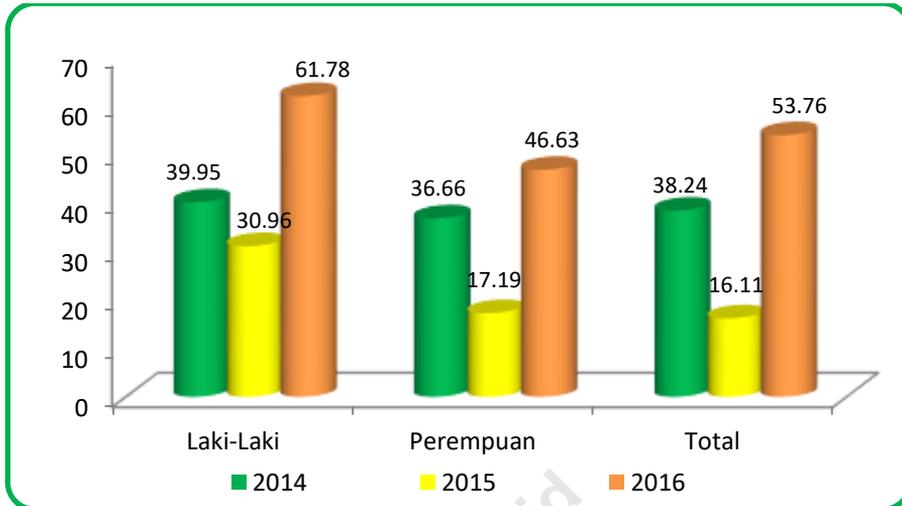
Berdasarkan hasil Susenas tahun 2015, sudah 100 persen persalinan di Kabupaten Soppeng ditolong oleh tenaga medis (dokter, bidan, dan tenaga paramedis lain). Proporsi tersebut menurun pada tahun 2016 menjadi sekitar 94,35 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih ada kurangnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat Kabupaten Soppeng dalam mengandalkan proses persalinan mereka kepada jasa tenaga medis.

Terbukti dari pertolongan persalinan yang dilakukan oleh tenaga non medis mencapai 5,65 persen pada tahun 2016. Oleh karena itu, diharapkan akses masyarakat terhadap fasilitas persalinan medis lebih terbuka secara luas dari berbagai segi, termasuk ketersediaan penyuluhan, sehingga semakin banyak masyarakat yang menggunakan bantuan tenaga medis untuk menolong persalinan mereka. Dengan pertolongan persalinan menggunakan tenaga medis diharapkan dapat menekan risiko kematian ibu dan bayi selama proses persalinan.

5.2 Status Kesehatan Masyarakat

Kondisi kesehatan masyarakat pada suatu waktu dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang status kesehatan masyarakat pada umumnya. Status kesehatan masyarakat dapat dipengaruhi oleh pola hidup masyarakat terutama dalam upaya preventif. Pola hidup tersebut juga sangat bergantung pada perilaku dan pendapatan masyarakat. Sulitnya memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat menyebabkan terjadi pergeseran pola makan yang secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap kesehatan sehingga menyebabkan perubahan tingkat produktivitas masyarakat.

Untuk mengukur status kesehatan masyarakat digunakan indikator Angka Kesakitan/*Morbidity Rate* (MR). Angka Kesakitan didefinisikan sebagai proporsi penduduk yang mengalami keluhan kesehatan sampai mengakibatkan terganggunya pekerjaan, sekolah maupun kegiatan sehari-hari terhadap keseluruhan penduduk yang ada di wilayah tersebut.



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2014-2016

Gambar 5.3 Angka Kesakitan (*Morbidity Rate*) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2016

MR Kabupaten Soppeng pada tahun 2016 sebesar 53,76 persen mengalami peningkatan yang cukup tajam dibandingkan dengan tahun 2014 (38,24 persen) dan 2015 (16,11 persen). Hal ini berarti bahwa banyaknya penduduk Kabupaten Soppeng yang mengalami gangguan kesehatan sampai mengakibatkan terganggunya kegiatan sehari-hari pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan dua tahun sebelumnya, atau dengan kata lain tingkat kesehatan penduduk Kabupaten Soppeng mengalami penurunan. Pemerintah Kabupaten Soppeng diharapkan untuk lebih dapat memperhatikan kondisi kesehatan masyarakat Soppeng baik dari segi fasilitas kesehatan sebagai sarana untuk berobat ataupun penyuluhan-penyuluhan terkait kesehatan

Berdasarkan jenis kelamin, persentase penduduk laki-laki yang sakit hingga mengganggu aktivitas sehari-hari pada tahun 2016 sebesar 61,78 persen lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan yang hanya mencapai 46,63 persen. Begitu juga dengan tahun 2014 dan tahun 2015, tingkat kesakitan penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa status kesehatan

penduduk laki-laki lebih buruk dibandingkan penduduk perempuan. Hal tersebut dapat diakibatkan karena laki-laki umumnya mengerjakan pekerjaan sehari-hari yang lebih berat/menguras tenaga dibandingkan perempuan sehingga kondisi fisik yang sedang sakit/lemah akan mengganggu aktivitas mereka.

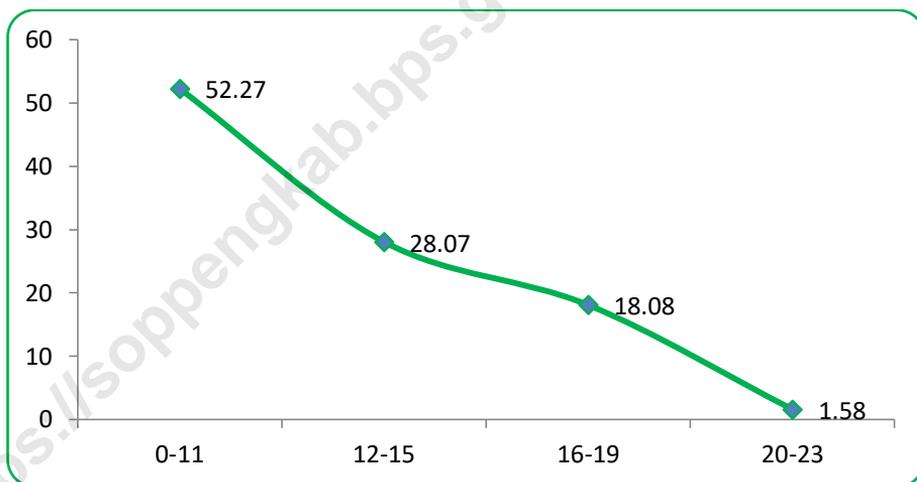
5.3 Pemberian Air Susu Ibu (ASI)

Makanan terbaik untuk bayi adalah ASI. Makanan pendamping ASI diberikan setelah bayi berusia 6 bulan. Kemudian ASI sebaiknya tetap diberikan sampai anak berusia 2 tahun. Penerapan pola pemberian makanan ini akan meningkatkan status gizi bayi dan anak serta mempengaruhi derajat kesehatan selanjutnya. Kesuksesan ibu dalam hal menyusui dapat diukur dari permulaan pemberian ASI dalam jam pertama kehidupan bayi. Menyusui memberikan kekebalan alami bagi tubuh bayi disamping kekebalan yang diberikan melalui vaksinasi. Selain itu, menyusui bagi ibu juga bermanfaat menunda kembalinya kesuburan seorang ibu dan mengurangi resiko pendarahan pasca melahirkan, kanker payudara, pra menopause serta kanker ovarium.

Pemerintah terus melakukan upaya-upaya untuk menyukseskan program pemberian ASI tersebut. Beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah diantaranya penetapan peraturan mengenai ASI Eksklusif minimal enam bulan, Inisiasi Menyusui Dini (IMD), pemberian informasi dan edukasi dengan cara penyuluhan, konseling dan pendampingan, pelarangan pemberian susu formula kecuali ada indikasi medis yang menyebabkan terhambatnya pemberian ASI, serta dukungan berupa aturan penyediaan ruang laktasi (menyusui) yang ditempatkan di sarana umum dan tempat-tempat kerja.

Pada tahun 2016, banyaknya balita yang diberi ASI sebanyak 89,63 persen. Hal ini berarti masih ada balita yang tidak pernah diberikan ASI sebanyak 10,37 persen. Kondisi ini menunjukkan kurangnya kesadaran ibu akan manfaat ASI yang diberikan kepada bayi.

Apabila dilihat dari lamanya pemberian ASI kepada balita, sebagian besar ibu yang memberikan ASI kepada balitanya hanya sampai balita tersebut berumur kurang dari 1 tahun (0-11 bulan) yakni sebesar 52,27 persen. Persentase ini terus menurun untuk kelompok lama pemberian ASI hingga balita berumur 20-23 bulan yakni hanya mencapai 1,58 persen. Mengingat betapa bermanfaatnya ASI bagi balita, pemerintah tetap diharapkan untuk terus menggalakkan program-program yang mendukung ibu menyusui dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menyusui. Upaya yang paling mudah dilakukan yaitu dengan memberikan penyuluhan kepada ibu sejak hamil hingga masa menyusui melalui kader-kader yang ada di fasilitas kesehatan.



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2016

Gambar 5.4 Lama Pemberian ASI pada Balita (0-23 Bulan) di Kabupaten Soppeng Tahun 2016

5.4 Pemberian Imunisasi

Imunisasi adalah pemberian kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit dengan memasukkan vaksin tertentu ke dalam tubuh agar tubuh tahan terhadap jenis penyakit tertentu. Imunisasi biasanya lebih fokus diberikan kepada anak-anak karena sistem kekebalan tubuh mereka belum

sebaik orang dewasa, sehingga lebih rentan terhadap serangan penyakit berbahaya. Imunisasi tidak cukup hanya dilakukan satu kali, tetapi harus dilakukan secara bertahap dan lengkap terhadap berbagai penyakit yang sangat membahayakan kesehatan dan hidup anak.

Keberhasilan program imunisasi tidak hanya dilihat dari banyaknya balita yang pernah mendapatkan imunisasi tetapi juga dari pemberian imunisasi secara lengkap. Kelengkapan jenis imunisasi bagi balita dapat dilihat pada Tabel 5.2. Walaupun belum mencapai nilai sempurna, tetapi dalam kurun waktu 2014-2016 hampir seluruh balita yang pernah diimunisasi di Kabupaten Soppeng sudah mendapatkan imunisasi lengkap. Imunisasi BCG selalu menjadi imunisasi dengan persentase pemberian tertinggi selama tiga tahun terakhir karena imunisasi ini diberikan pada saat bayi lahir. Sementara imunisasi campak/morbili hanya mencapai 81,81 persen pada tahun 2016 dan merupakan jenis imunisasi dengan tingkat persentase pemberian imunisasi paling rendah untuk kurun waktu yang sama.

Tabel 5.1 Persentase Balita yang Menerima Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2016

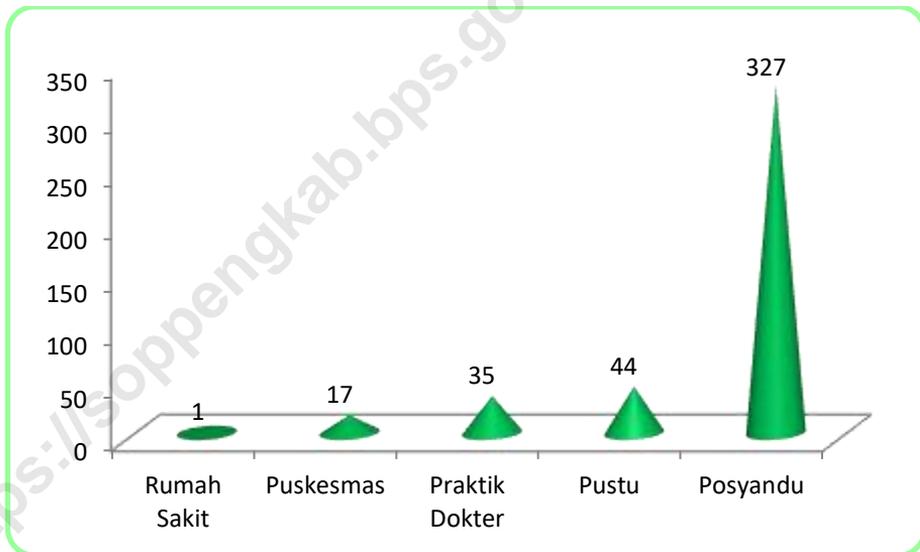
Jenis Imunisasi	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
BCG	99,37	94,26	94,34
DPT	97,75	89,89	92,74
Polio	97,75	92,62	92,85
Campak/Morbili	85,82	80,18	81,81
Hepatitis B	97,86	92,61	93,57

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2014-2016

5.5 Fasilitas Kesehatan

Tersedianya fasilitas kesehatan yang baik, murah dan terjangkau oleh semua kalangan adalah salah satu prasyarat tercapainya masyarakat yang sejahtera. Keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan sampai wilayah terpencil dan mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat, termasuk yang tidak mampu, tentunya sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan kesehatan.

Kantung-kantung layanan kesehatan di kecamatan dan desa terdiri dari puskesmas, pustu, dan poskesdes. Di Kabupaten Soppeng, terdapat sebanyak 17 unit puskesmas dan 44 unit puskesmas pembantu (pustu)/poliklinik yang tersebar di seluruh kecamatan.



Sumber : Soppeng Dalam Angka 2017

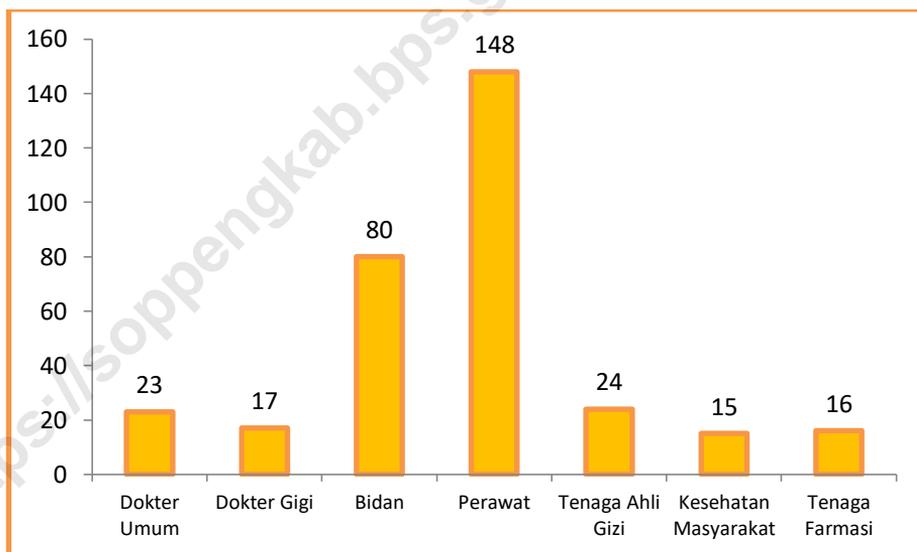
Gambar 5.5 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Soppeng Tahun 2016

Selain pustu, tersedia fasilitas kesehatan lain yang membantu menopang pelayanan kesehatan masyarakat diantaranya 327 unit posyandu. Layanan kesehatan di luar yang disediakan pemerintah, terdapat 35 unit tempat praktik dokter swasta untuk melayani masyarakat di luar jam kerja.

5.6 Tenaga Kesehatan

Fasilitas kesehatan yang tersedia selain harus memiliki sarana dan perlengkapan yang memadai, perlu ditunjang dengan kualitas pelayanan yang baik pula. Kualitas pelayanan pada fasilitas kesehatan sangat tergantung pada kualitas tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas kesehatan tersebut.

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Kualitas tenaga kesehatan sangat ditentukan oleh spesifikasi pendidikan yang dimiliki yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang akan diberikan pada masyarakat.



Sumber : Soppeng dalam Angka 2017

Gambar 5.6 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Soppeng Tahun 2016

Pada tahun 2016, di Kabupaten Soppeng terdapat sebanyak 23 orang dokter umum dan 17 orang dokter gigi yang siap memberikan pelayanan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Selain dokter, tenaga kesehatan yang membantu memberikan pelayanan di fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Soppeng antara lain 148 orang perawat

80 orang bidan, 24 tenaga ahli gizi, 15 tenaga kesehatan masyarakat dan 16 tenaga farmasi. Dengan adanya para tenaga kesehatan tersebut, diharapkan status kesehatan masyarakat Kabupaten Soppeng akan terus mengalami peningkatan.

<https://soppengkab.bps.go.id>

BAB VI

PERUMAHAN

Salah satu kebutuhan dasar manusia selain pangan dan sandang adalah papan/rumah tempat tinggal. Perumahan sebagai sarana berlindung dan tempat tinggal bagi keluarga merupakan keperluan yang harus tersedia sekalipun tidak harus memilikinya. Selain sebagai tempat berlindung dan mempertahankan diri dari kondisi lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial, rumah tempat tinggal juga dapat menunjukkan gaya hidup dan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berbanding lurus dengan kualitas/kondisi rumahnya. Semakin tinggi status sosial maka semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik.

Kualitas tersebut ditentukan oleh fisik rumah tersebut yang dapat terlihat dari kondisi fasilitas yang ada di dalamnya, antara lain penguasaan tempat tinggal, lantai rumah (luas dan jenis), jenis dinding dan atap, fasilitas penerangan, sumber air minum, serta fasilitas buang air besar (jenis dan tempat penampungan tinja). Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

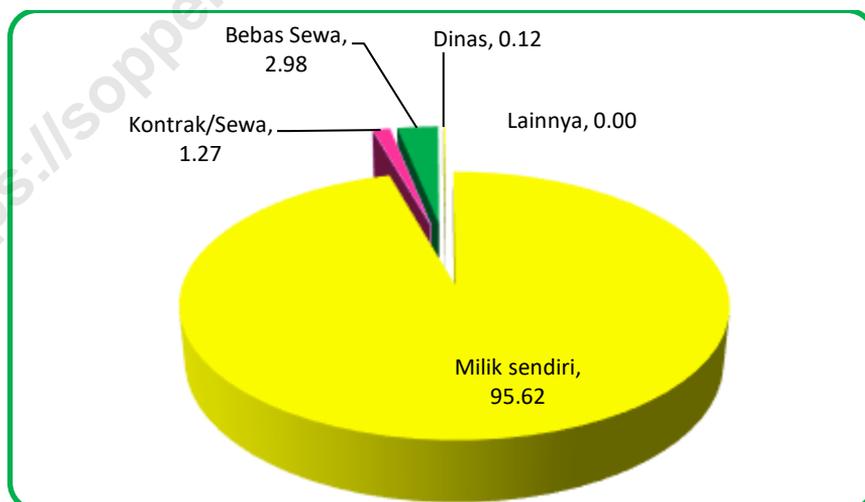
Kebijakan pemerintah di bidang perumahan bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup dengan cara mengadakan dan meningkatkan mutu fisik dan fasilitas lingkungan perumahan termasuk bentuk, ukuran/tipe rumah, dan bahan bangunan yang digunakan. Kebijakan ini berhadapan dengan faktor-faktor yang ada dalam masyarakat seperti pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi, kemampuan masyarakat yang terbatas dan biaya pembangunan perumahan yang semakin besar. Salah satu upaya pemerintah untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan rumah yaitu menyediakan fasilitas kredit kepemilikan rumah (KPR).

Pemukiman merupakan bagian penting di dalam usaha pengentasan kemiskinan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan peningkatan produktivitas dengan penyediaan kebutuhan masyarakat akan perumahan yang sehat, air yang bersih dan lingkungan yang sehat serta terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Untuk menggambarkan kualitas perumahan dan lingkungan, BPS menggunakan pendekatan rumah tangga yang menempati suatu bangunan. Pemerintah telah berupaya mempermudah masyarakat untuk mendapatkan rumah melalui berbagai program diantaranya menyediakan fasilitas kredit kepemilikan rumah (KPR).

6.1 Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal

Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tempat tinggal. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjangkau dan permanen dalam jangka panjang.



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2016

Gambar 6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Soppeng Tahun 2016

Pada tahun 2016, hampir seluruh rumah tangga di Kabupaten Soppeng telah memiliki rumah sendiri. Sebesar 95,62 persen dari seluruh rumah tangga yang ada di Kabupaten Soppeng memiliki rumah dengan status milik sendiri. Sisanya, sebesar 4,38 persen menempati rumah dinas, bebas sewa, kontrak/sewa, dan lainnya.

6.2 Kualitas Perumahan

Kualitas rumah tinggal sangat ditentukan oleh kualitas bahan bangunan yang digunakan yang secara nyata mencerminkan tingkat kesejahteraan penghuninya. Oleh karena itu, aspek kesehatan dan kenyamanan bahkan estetika bagi sekelompok masyarakat tentu sangat menentukan dalam pemilihan rumah tinggal. Kualitas bahan bangunan yang digunakan dapat dilihat dari atap, dinding dan lantai yang digunakan.

Kriteria rumah yang layak dan sehat untuk dijadikan tempat tinggal adalah apabila rumah tersebut memiliki atap terluas berupa beton atau genteng, dinding terluas yang terbuat dari tembok atau kayu serta lantai terluas bukan berupa tanah.

Selain itu, menurut *World Health Organization* (WHO), salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah yang memiliki luas lantai per kapita minimal 10 m². Sedangkan menurut Pedoman Umum Rumah Sederhana Sehat, kebutuhan ruang per kapita dihitung berdasarkan aktifitas dasar manusia di dalam rumah yang meliputi tidur, makan, kerja, duduk, mandi, kakus, cuci, masak dan ruang gerak lainnya. Menurut Kementerian Kesehatan, salah satu persyaratan rumah sehat adalah jika penguasaan luas lantai per kapitanya minimal 8 m².

6.2.1 Jenis Atap Terluas

Atap merupakan komponen yang secara langsung berfungsi menahan atau melindungi dari teriknya sinar matahari dan turunnya hujan. Oleh karena itu, bahan yang digunakan sebaiknya yang kuat dan tahan

lama. Selain dari segi daya tahannya, pemilihan jenis atap sebagai pelindung tempat tinggal dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya pengaruh harga, seni dan budaya daerah. Dari jenis atap yang dimiliki oleh rumah tangga dapat diketahui tingkat kemakmuran rumah tangga yang menempatinnya.

Tabel 6.1 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Atap Terluas di Kabupaten Soppeng Tahun 2015-2016

Jenis Atap	2015	2016
(1)	(2)	(3)
Atap layak	99,86	99,53
Beton	1,07	0,25
Genteng	0,78	0,56
Kayu/Sirap	0,43	0,28
Seng	96,66	97,06
Asbes	0,60	0,55
Bambu	0,32	0,83
Atap tidak layak	0,14	0,47
Jerami/Ijuk/Rumbia	0,14	0,27
Lainnya	-	0,20
Jumlah	100,00	100,00

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2015-2016

Pada Tabel 7.1, terlihat bahwa mayoritas rumah tangga di Kabupaten Soppeng menggunakan atap rumah berjenis seng. Penggunaan atap berbentuk seng selama dua tahun terakhir dari tahun 2015 hingga tahun 2016 mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2015 penggunaan atap seng mencapai 96,66 persen, maka pada tahun 2016 meningkat menjadi 97,06 persen.

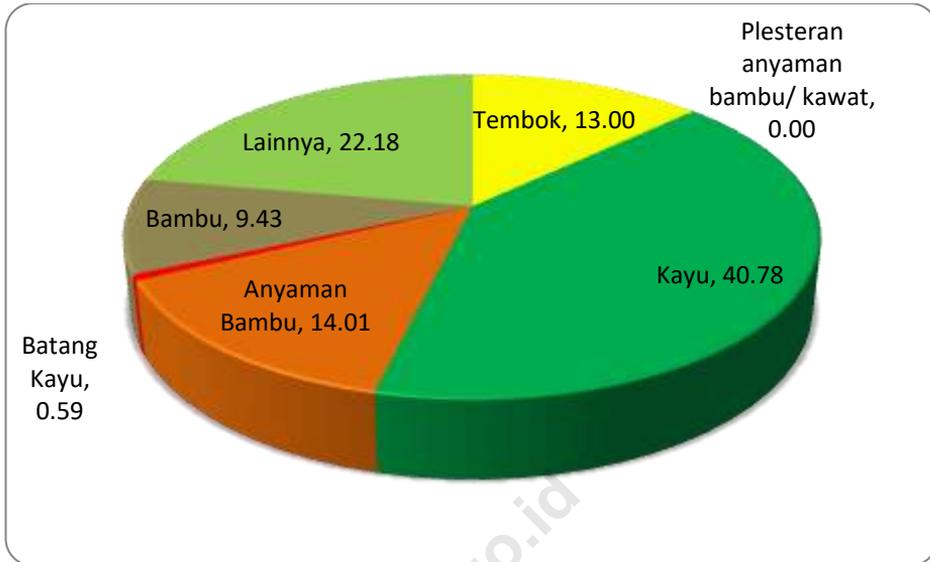
Penggunaan seng sebagai atap rumah tempat tinggal disebabkan adanya adat dan budaya di Kabupaten Soppeng yang masih mempertahankan rumah dengan model rumah panggung. Rumah panggung di Kabupaten Soppeng yang bahan utamanya yaitu kayu pada umumnya

menggunakan atap jenis seng. Akan tetapi, seiring berkembangnya jaman, banyak rumah tangga yang mulai meninggalkan adat dan budaya tersebut dan beralih menempati rumah-rumah yang tidak bermodel rumah panggung sehingga banyak juga perubahan pada jenis atap yang digunakan meskipun persentasenya masih sangat kecil.

6.2.2 Jenis Dinding Terluas

Dinding rumah merupakan salah satu komponen penting dari bangunan tempat tinggal. Pemilihan jenis dinding oleh rumah tangga dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya daya tahan dan kemampuan ekonomi dari rumah tangga yang menempati. Selain berfungsi sebagai pembatas antar ruangan, dinding juga digunakan untuk melindungi diri dari pengaruh cuaca/iklim dan ancaman dari luar rumah. Oleh karena itu, jenis dinding yang digunakan seharusnya terbuat dari bahan yang tidak tembus pandang serta dapat menahan panas dan dingin, sehingga bisa dikatakan kondisinya dapat memenuhi syarat kesehatan. Kualitas dinding suatu rumah akan menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga yang menempatinnya.

Rumah panggung yang banyak dijumpai di Kabupaten Soppeng umumnya menggunakan dinding jenis kayu, bambu maupun jenis lain seperti seng dan lainnya. Jenis dinding yang paling banyak digunakan yaitu kayu/sirap dengan persentase sebesar 40,78 persen pada tahun 2016. Persentase terbesar kedua terjadi pada penggunaan dinding tembok. Pada tahun 2016 nilainya mencapai 13,00 persen. Penggunaan dinding tembok/beton untuk tempat tinggal dari segi kualitas lebih baik karena berdasarkan segi daya tahan dan harga, dinding jenis tembok/beton memiliki kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan dinding jenis lain.



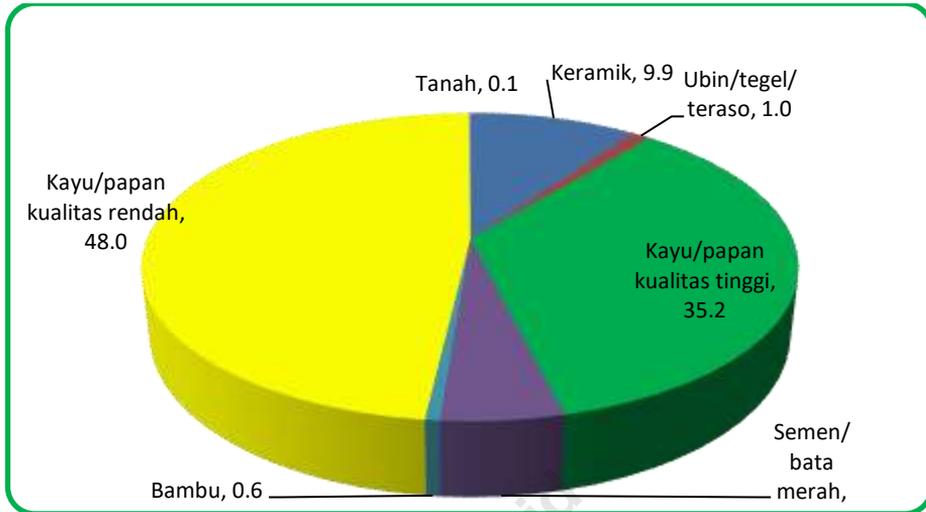
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2016

Gambar 6.2 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Dinding Terluas di Kabupaten Soppeng Tahun 2016

6.2.3 Jenis dan Luas Lantai

Persyaratan rumah sehat menurut Kementerian Kesehatan dari segi lantai yaitu lantai rumah harus kering/tidak lembab. Oleh karena itu bahan penutup lantai harus terbuat dari marmer/keramik/granit, tegel/teraso atau semen (untuk rumah bukan panggung/tingkat) dan terbuat dari kayu atau jenis lainnya seperti bambu dan lain-lain (untuk rumah panggung).

Pada tahun 2016, rumah tangga sudah menerapkan rumah sehat yaitu yang menggunakan lantai bukan tanah sebesar 99,90 persen. Lantai tersebut terdiri dari beberapa jenis yaitu 83,2 persen berupa kayu (kualitas baik dan rendah) yang biasa digunakan dalam rumah panggung, dan sisanya sebanyak 16,7 persen berupa lantai keramik, tegel/teraso/ubin, semen, dan bambu yang biasa digunakan dalam rumah bukan panggung. Di Kabupaten Soppeng sampai tahun 2016 masih terdapat rumah yang berlantaikan tanah. Sebanyak 0,1 persen rumah tersebut masih termasuk ke dalam rumah yang kurang sehat karena berlantaikan tanah.



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2016

Gambar 6.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas di Kabupaten Soppeng Tahun 2016

6.3 Fasilitas Perumahan

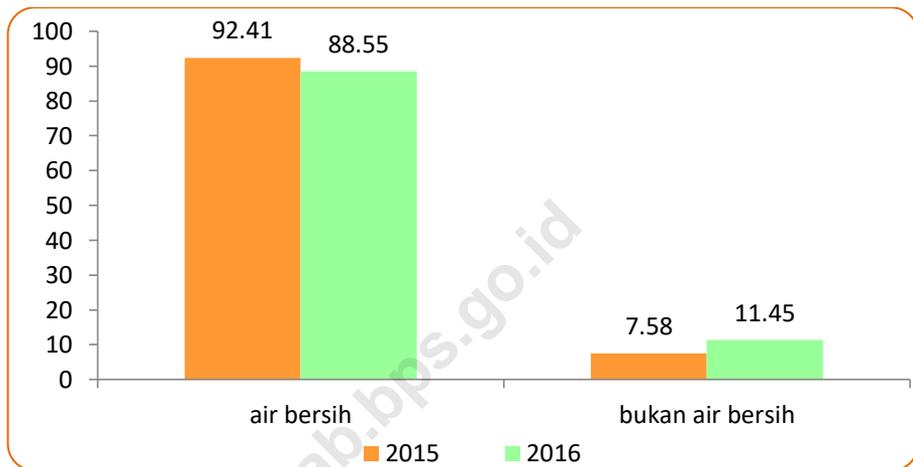
Indikator ini menunjukkan kelengkapan, kelayakan, dan fasilitas perumahan. Semakin lengkap fasilitas suatu rumah, maka anggota rumah tangga yang menempati rumah tersebut akan semakin nyaman. Fasilitas perumahan ditinjau dari beberapa segi, antara lain sumber air minum, sumber penerangan dan fasilitas buang air besar baik dari segi penggunaan, jenis maupun tempat penampungan tinja.

6.3.1 Sumber Air Minum

Air merupakan kebutuhan vital dalam kehidupan manusia. Air sangat dibutuhkan dalam proses metabolisme dalam tubuh manusia, selain itu air juga dibutuhkan untuk membersihkan, mandi, mencuci pakaian dan sebagainya. Oleh karena itu, salah satu indikator penting untuk mengukur derajat kesehatan rumah tangga adalah keberadaan sumber air minum yang digunakan.

Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan

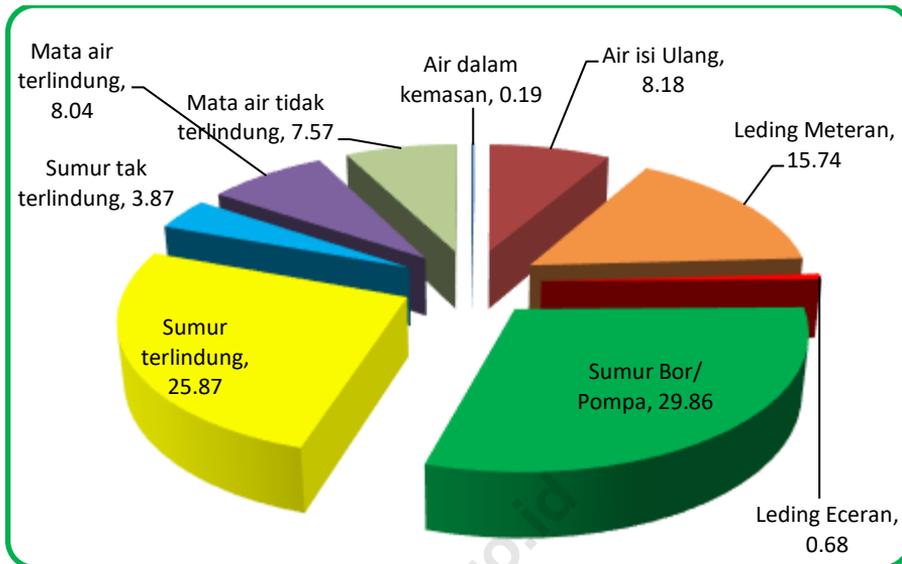
minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus diupayakan oleh pemerintah. Penggunaan air bersih dapat diperoleh dari berbagai sumber air seperti air minum kemasan, air isi ulang, leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Sumber air minum sangat mempengaruhi kualitas air minum.



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2015-2016

Gambar 6.4 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum di Kabupaten Soppeng Tahun 2015-2016

Pada tahun 2016, ada sebanyak 92,41 persen rumah tangga yang sudah menggunakan air bersih untuk kebutuhan minumannya. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai 92,41 persen. Dengan demikian, masih terdapat 11,45 persen rumah tangga pada tahun 2016 di Kabupaten Soppeng yang menggunakan bukan air bersih (sumur tak terlindung, mata air tak terlindung, dan air sungai) untuk kebutuhan minumannya.



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2016

Gambar 7.5 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum di Kabupaten Soppeng Tahun 2016

Apabila dirinci menurut jenis sumber air minumnya, pada tahun 2016 sumber air minum utama yang menggunakan air bersih merupakan air dengan jenis sumur bor/pompa. Sebanyak 29,86 persen dari total rumah tangga di Kabupaten Soppeng menggunakan sumur bor/pompa. Urutan selanjutnya dari persentase tinggi ke rendah berturut-turut yaitu air sumur terlindung, leding meteran, air isi ulang, dan mata air terlindung.

6.3.2 Fasilitas Penerangan

Fasilitas perumahan lain yang tidak kalah penting yaitu fasilitas penerangan. Dari berbagai macam sumber penerangan seperti listrik, petromak/aladin, pelita/sentir/obor dan lain-lain, sumber penerangan yang paling ideal adalah sumber penerangan yang berasal dari listrik karena cahaya yang dihasilkan lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya. Selain itu, sumber penerangan yang berasal dari listrik lebih praktis, modern, dan tidak menimbulkan polusi sehingga menjadikan listrik sebagai sumber penerangan yang memiliki nilai lebih tinggi dari sumber yang lain.

Rumah tangga yang menggunakan listrik dianggap mempunyai tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

Ketersediaan listrik di suatu daerah selain dimanfaatkan sebagai sumber penerangan juga digunakan sebagai fasilitas penunjang untuk akses informasi khususnya media elektronik seperti radio, televisi, internet, dan sebagainya. Dengan adanya informasi yang didapat, secara tidak langsung juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan dari rumah tangga tersebut sehingga tingkat kemajuan suatu masyarakat juga dapat dilihat dari ketersediaan dan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi ini. Mengingat jangkauan listrik yang sangat terbatas, maka tidak semua rumah tangga bisa memperoleh fasilitas tersebut yang dapat berdampak langsung terhadap terhambatnya kelangsungan penyebaran informasi khususnya informasi yang berasal dari media elektronik.



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2016

Gambar 6.6 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan di Kabupaten Soppeng Tahun 2016

Gambar 7.6 memperlihatkan bahwa hampir seluruh rumah tangga di Kabupaten Soppeng pada tahun 2016 sudah menggunakan listrik sebagai

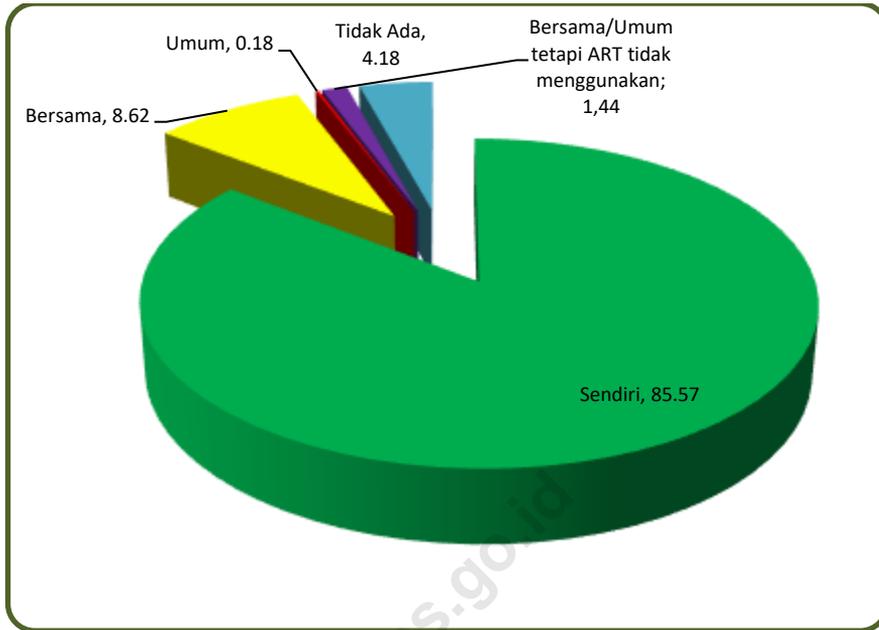
sumber penerangan. Terdapat 98,56 persen dari total rumah tangga yang menggunakan listrik PLN dan 0,23 persen listrik Non PLN. Masih terdapat rumah tangga yang belum merasakan manfaat dari penggunaan listrik ini, yaitu sekitar 1,21 persen rumah tangga di Kabupaten Soppeng masih menggunakan pelita/ sentir/ obor sebagai sumber penerangannya karena belum terjangkaunya aliran listrik.

Oleh karena itu, diharapkan pemerintah dapat memfasilitasi ketersediaan sumber listrik ini sehingga dapat menjangkau seluruh daerah dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh rumah tangga yang ada di Kabupaten Soppeng.

6.3.3 Fasilitas Buang Air Besar

Sistem pembuangan sangat erat kaitannya dengan kondisi sanitasi lingkungan dan resiko penularan penyakit, khususnya penyakit saluran pencernaan. Masalah sanitasi lingkungan tidak terlepas dari aspek kepemilikan sarana yang digunakan terutama dikaitkan dengan tanggung jawab dalam pemeliharaan dan kebersihan sarana tersebut. Fasilitas rumah tangga yang berhubungan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban. Fasilitas tempat buang air besar dibedakan menjadi empat kategori yaitu sendiri, bersama, umum dan tidak ada.

Mayoritas rumah tangga di Kabupaten Soppeng sudah memiliki kakus sendiri di rumahnya. Pada tahun 2016, sebanyak 85,57 persen rumah tangga sudah memiliki kakus sendiri di Kabupaten Soppeng. Namun, masih ada rumah tangga yang menggunakan kakus bersama, umum, tidak menggunakan kakus yang tersedia, bahkan ada yang tidak memiliki kakus. Masih terdapat 4,18 persen rumah tangga yang tidak memiliki kakus sebagai fasilitas buang air besar pada tahun 2016.



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2016

Gambar 6.7 Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Buang Air Besar di Kabupaten Soppeng Tahun 2016

Fasilitas buang air besar dianggap memenuhi syarat kesehatan apabila kloset yang digunakan berjenis leher angsa atau plengsengan dengan penampungan akhir berupa tangki septik. Tangki septik dapat mencegah limbah untuk tidak mencemari lingkungan terutama air sumur yang dibuat/berada di sekitar tempat tersebut.

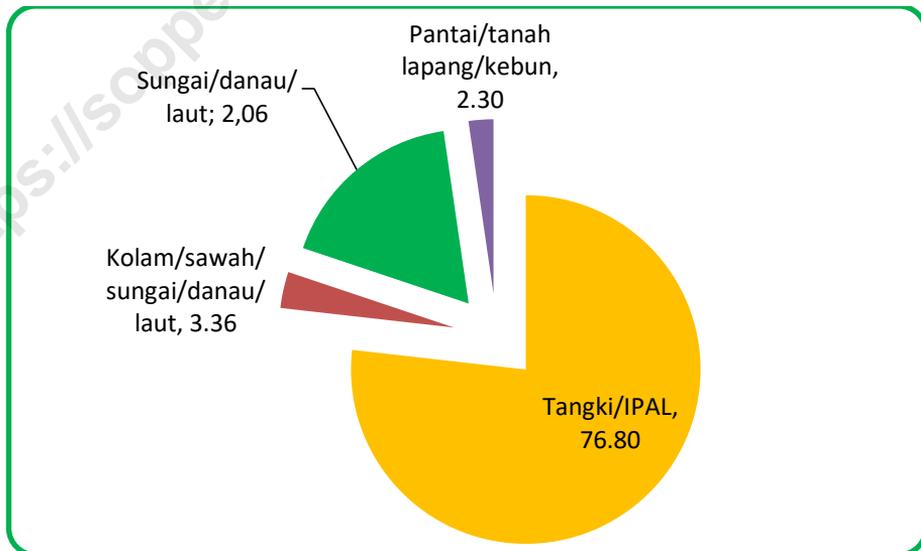
Fasilitas buang air besar rumah tangga di Kabupaten Soppeng pada tahun 2015 sudah menunjukkan kondisi yang baik yakni sebanyak 98,16 persen rumah tangga menggunakan kloset jenis leher angsa, mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya yang sebesar 98,76 persen. Hal ini disebabkan ada rumah tangga yang beralih dengan menggunakan plengsengan. Walaupun demikian, kondisi fasilitas buang air besar yang baik mengalami peningkatan, terlihat dengan semakin rendahnya rumah tangga yang menggunakan kloset cempulung/cubluk atau bahkan tidak memiliki kloset di rumahnya di tahun 2016.

Tabel 6.4 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Kloset yang digunakan di Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2016

Jenis Kloset	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
Leher angsa	97,89	98,76	98,14
Plengsengan	0,16	0,32	1,44
Cemplung/cubluk/ tidak pakai	1,95	0,92	0,42
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2014-2016

Di Kabupaten Soppeng, sudah banyak rumah tangga yang menggunakan tangki septik/SPAL yaitu sebanyak 76,80 persen. Kondisi sanitasi lingkungan di Kabupaten Soppeng tampaknya masih belum terlalu sehat dikarenakan masih banyak rumah tangga yang tempat penampungan tinjanya berada di area terbuka seperti kolam/sawah, sungai/danau/laut, pantai/tanah lapang/kebun dan lainnya meskipun jumlahnya sudah berkurang dari tahun sebelumnya.



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2016

Gambar 6.8 Persentase Rumah Tangga menurut Tempat Pembuangan Tinja di Kabupaten Soppeng Tahun 2016

Tempat penampungan tinja yang berada di area terbuka dikatakan tidak sehat karena cenderung lebih mudah menimbulkan penyebaran penyakit bagi lingkungan di sekitarnya, khususnya penyakit saluran pencernaan. Melihat kondisi tersebut, pemerintah dituntut untuk meningkatkan perhatiannya dalam hal perumahan melalui program-program pembangunan sarana sanitasi lingkungan agar lingkungan menjadi lebih sehat dan penduduk tinggal dengan nyaman.

<https://soppengkab.bps.go.id>

BAB VII

LAIN-LAIN

Kesejahteraan penduduk suatu wilayah dapat dilihat dari besarnya pendapatan yang diperoleh. Semakin tinggi tingkat pendapatan penduduk, maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Data tentang penghasilan/pendapatan penduduk sangat sulit diperoleh, sehingga pendekatan yang sering digunakan oleh BPS dalam survei yaitu pendekatan pengeluaran rumah tangga. Hal tersebut dilakukan karena ada kecenderungan masyarakat memberikan jawaban mengenai pendapatan yang kurang akurat, sebaliknya penduduk cenderung memberikan jawaban yang jujur dan akurat apabila ditanyakan tentang pengeluaran konsumsi.

Data pengeluaran dapat digunakan untuk melihat pola konsumsi rumah tangga secara umum melalui indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan nonmakanan. Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator sosial ekonomi masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan setempat. Budaya setempat dan perilaku lingkungan akan membentuk pola kebiasaan tertentu pada sekelompok masyarakat dimana mereka berada. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran dalam menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk karena besarnya nilai nominal (rupiah) yang dibelanjakan baik dalam bentuk makanan maupun nonmakanan tersebut secara tidak langsung dapat mencerminkan kemampuan ekonomi rumah tangga untuk mencukupi kebutuhan yang mencakup barang dan jasa.

7.1 Golongan Pengeluaran Per Kapita

Secara umum, pengeluaran rumah tangga dibagi ke dalam dua kategori, yaitu pengeluaran untuk konsumsi makanan dan nonmakanan. Ada suatu teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan

rumah tangga, maka akan semakin kecil proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga atau akan semakin besar proporsi pengeluaran untuk konsumsi nonmakanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Berdasarkan teori tersebut, dapat dilihat peningkatan kesejahteraan melalui pergeseran pola pengeluaran masyarakat, yaitu pergeseran pengeluaran untuk konsumsi makanan ke pengeluaran untuk konsumsi nonmakanan. Dapat dikatakan bahwa rumah tangga semakin sejahtera apabila persentase pengeluaran untuk konsumsi makanan lebih kecil dibandingkan dengan persentase pengeluaran untuk konsumsi nonmakanan.

Tabel 7.1 Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran per Kapita di Kabupaten Soppeng Tahun 2015-2016

Golongan Pengeluaran (Rp)	2015	2016
(1)	(2)	(3)
≤ 99.999	0,90	4,19
100.000-149.999	12,57	11,75
150.000-199.999	20,00	18,25
200.000-299.999	32,76	29,54
300.000-499.999	21,02	26,17
500.000-749.999	8,93	7,63
750.000-999.999	1,72	2,07
≥ 1.000.000	2,09	0,4
Jumlah	100,00	100,00

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2015-2016

Bila dikelompokkan menurut golongan pengeluaran, pada Tabel 7.1 tampak bahwa persentase terbesar total pengeluaran perkapita penduduk sebulan di Kabupaten Soppeng pada tahun 2016 paling banyak pada golongan pengeluaran Rp.200.000-Rp.299.000, yaitu 29,54 persen. Jika dilihat lebih lanjut, golongan pengeluaran Rp 300.000-499.999 mengalami peningkatan persentase pada tahun 2016 dari tahun 2015 dibandingkan

dengan golongan pengeluaran lainnya. Peningkatan tersebut mencapai 5,15 persen. Sementara penurunan tertinggi terjadi pada golongan pengeluaran di atas Rp 1.000.00,00 yakni mencapai 1,69 persen. Jika pada tahun 2015 persentase penduduk pada golongan pengeluaran ini sebesar 2,09 persen, pada tahun 2016 nilainya turun menjadi 0,4 persen.

7.2 Pengeluaran Per Kapita Sebulan dan Pola Konsumsi Penduduk

Tingkat kesejahteraan penduduk dapat pula dilihat dari pola konsumsinya dan pengeluaran perkapita. Menurut Hukum Engel, apabila proporsi konsumsi makanan jauh lebih besar dibanding proporsi konsumsi nonmakanan menunjukkan bahwa taraf hidup penduduk tersebut tergolong masih rendah, karena mereka masih cenderung memenuhi kebutuhan pangan terlebih dahulu dibanding kebutuhan nonpangan seperti sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.

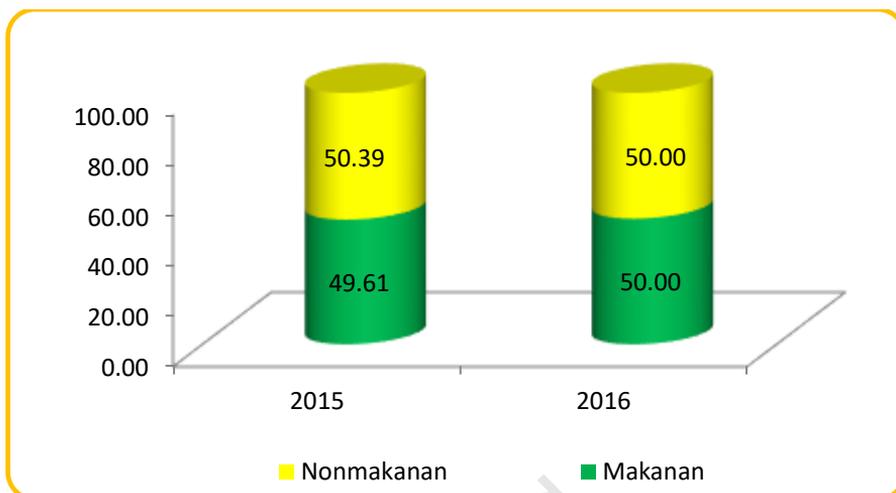
Pada tahun 2014, rata-rata total pengeluaran per kapita sebulan penduduk di Kabupaten Soppeng yaitu sebesar Rp 654.817,00 dengan rincian untuk konsumsi makanan sebesar Rp 295.520,00 dan untuk konsumsi nonmakanan sebesar Rp 359.297,00. Pada tahun 2015, rata-rata total pengeluaran per kapita sebulan penduduk mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi Rp 608.306,00 dengan pengeluaran untuk konsumsi makanan sebesar Rp 301.659,00 dan pengeluaran untuk konsumsi non makanan sebesar Rp 306.377,00.

Tabel 7.2 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan di Kabupaten Soppeng Tahun 2015 -2016 (Rupiah)

Jenis Pengeluaran	Pengeluaran Per Kapita Sebulan (Rp)	
	2015	2016
(1)	(2)	(3)
Makanan	301.659	225.980
Nonmakanan	306.377	225.980
Total	608.036	451.960

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2015-2016

Selama dua tahun terakhir, rata-rata total pengeluaran per kapita sebulan mengalami penurunan. Apabila diamati pada gambar 7.1, selama rentang waktu 2015-2016, terjadi peningkatan pengeluaran perkapita sebulan untuk konsumsi makanan. Pada tahun 2016, pengeluaran perkapita sebulan penduduk Kabupaten Soppeng untuk konsumsi makanan meningkat menjadi 50,00 persen daripada tahun 2015 yang hanya mencapai 49,61 persen. Begitu pula sebaliknya, pengeluaran perkapita sebulan konsumsi non makanan menurun menjadi 50,00 persen pada tahun 2016 dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 50,39 persen. Apabila diamati lebih jauh, presentase pengeluaran penduduk sebulan untuk konsumsi non makanan sama dengan pengeluaran penduduk sebulan konsumsi makanan. Menurut Hukum Engel, kondisi tersebut menunjukkan taraf hidup penduduk Kabupaten Soppeng yang sedikit menurun apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2015-2016

Gambar 7.1 Persentase Pengeluaran Penduduk untuk Makanan dan Non Makanan di Kabupaten Soppeng Tahun 2015 dan 2016

7.3 Penduduk Miskin

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat yang berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu kemiskinan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang/rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik untuk makanan maupun non makanan. Kemiskinan dapat dilihat dari dua ukuran makro yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Akan tetapi dalam tulisan ini hanya menyajikan data kemiskinan absolut yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.

Data kemiskinan absolut adalah data kemiskinan yang merefleksikan suatu standar seperti kebutuhan pokok minimal. Kemiskinan absolut diukur berdasarkan indikator bersifat uang (garis kemiskinan) dengan pendekatan kebutuhan dasar.

Garis kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK) dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis kemiskinan Makanan merupakan nilai pengeluaran minimum makanan (setara 2100 kkal/hari) yang diwakili 52 komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, buah-buahan, minyak, dan lain-lain), sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan yang diwakili oleh 51 komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Tabel 7.3 Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2016

Indikator Kemiskinan	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
Garis Kemiskinan	207.084	213.164	220.192
Jumlah Penduduk Miskin	19.780	18.880	19.120

Sumber: Badan Pusat Statistik

Selama kurun waktu 2014-2016, Garis Kemiskinan Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan. Meningkatnya pengeluaran penduduk membuat Garis Kemiskinan juga meningkat. Pada tahun 2016 nilai Garis Kemiskinan Kabupaten Soppeng mencapai 220.192 rupiah, yakni meningkat dibandingkan tahun 2014 yang hanya 207.084 rupiah dan tahun 2015 yang hanya mencapai 213.164 rupiah.

Penduduk miskin di Kabupaten Soppeng pada tahun 2014 berjumlah 19.780 orang. Kemudian pada tahun 2015, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan yaitu 18.880 orang dan tahun 2016 meningkat menjadi 19.120 orang. Peningkatan jumlah penduduk miskin ini disebabkan

karena kurang meratanya pengeluaran di Kabupaten Soppeng pada tahun 2016.

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang menjadi tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah, swasta, masyarakat maupun berbagai pihak lain, sehingga diharapkan kemiskinan di Kabupaten Soppeng akan terus menurun di masa yang akan datang seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai macam program pemerintah.

<https://soppengkab.bps.go.id>

LAMPIRAN TABEL

<https://soppengkab.bps.go.id>

<https://soppengkab.bps.go.id>

Tabel 1. Beberapa Indikator Kependudukan Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2016

No	Indikator	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penduduk	225 709	226 116	226.305
	• Laki-laki	106 206	106 391	106.484
	• Perempuan	119 503	119 725	119.821
2	Rasio Jenis Kelamin	88,87	88,86	88,87
3	Laju Pertumbuhan Penduduk			
	• 2013-2014		0,09 % / tahun	
	• 2014-2015		0,18 % / tahun	
	• 2014-2015		0,08 % / tahun	
4	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	150	151	151
5	Penduduk menurut Kelompok Umur			
	• 0-14	55 919	55 262	54 594
	• 15-64	147 642	148 362	148 876
	• 65 +	22 148	22 492	22 835
6	Angka Beban Ketergantungan	52,88	52,41	52,01
7	Jumlah Kecamatan	8	8	8
8	Jumlah Desa/Kelurahan	70	70	70
9	Luas Wilayah	1 500 km ²	1 500 km ²	1 500 km ²
10	Status Perkawinan Penduduk Usia 10 tahun ke Atas (%)			
	• Belum Kawin	28,83	29,24	29,24
	• Kawin	57,00	56,64	56,64
	• Cerai Hidup	3,98	3,8	3,8
	• Cerai Mati	10,19	10,32	10,32

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/ Kota di Indonesia Tahun 2010-2020
Survei Sosial Ekonomi Nasional 2014-2016

Tabel 2. Beberapa Indikator Fertilitas dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2016

No	Indikator	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Usia Kehamilan Pertama Wanita Pernah Kawin (%)			
	• <= 16	25,37	10,84	19,13
	• 17 – 18	16,17	19,87	22,77
	• 19 – 24	40,97	36,85	17,11
	• 25 +	17,49	21,28	40,99
2	Partisipasi KB Wanita Umur 15-49 tahun (%)			
	<i>a. Pernah Memakai</i>	73,40	59,07	60,46
	• Sedang Memakai (prevalensi KB)	49,46	43,18	42,11
	• Tidak Memakai (drop out)	23,94	15,89	18,34
	<i>b. Tidak Pernah Memakai</i>	26,60	40,94	39,54

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2014-2016

Tabel 3. Beberapa Indikator Pendidikan Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2016

No	Indikator	2014/2015	2015/2016	2016/2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah Sekolah :			
	• SD/ sederajat	277	272	271
	• SLTP/ sederajat	69	71	70
	• SLTA/ sederajat	31	31	31
2	Jumlah Murid :			
	• SD/ sederajat	24615	22433	21881
	• SLTP/ sederajat	14484	11724	11680
	• SLTA/ sederajat	10874	9621	9401
3	Jumlah Guru :			
	• SD/ sederajat	2726	2640	2640
	• SLTP/ sederajat	1489	1460	1460
	• SLTA/ sederajat	1031	1139	1047
4	Rasio Murid-Guru :			
	• SD/ sederajat	9,03	8,50	8,29
	• SLTP/ sederajat	9,73	8,03	8,00
	• SLTA/ sederajat	10,55	8,45	8,98
5	Rasio Murid Sekolah :			
	• SD/ sederajat	89,18	81,28	80,74
	• SLTP/ sederajat	213,00	172,41	166,86
	• SLTA/ sederajat	350,77	310,35	303,26

Sumber : Soppeng dalam Angka 2014-2016

Tabel 3. Beberapa Indikator Pendidikan Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2016 (lanjutan)

No	Indikator	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Angka Melek Huruf Penduduk 10 Tahun ke Atas (%)			
	• Laki-Laki+Perempuan	95,88	88,36	-
7	Pendidikan yang ditamatkan Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas (%)			
	• Tidak/belum pernah sekolah	8,16	10,66	-
	• Tidak/belum tamat SD/ sederajat	23,12	21,83	-
	• SD/ sederajat	29,60	28,52	-
	• SLTP/ Sederajat	16,06	14,54	-
	• SMU/ Sederajat	15,06	15,93	-
	• Perguruan Tinggi	8,00	8,52	-
8	Angka Partisipasi Sekolah (APS)			
	• 7 – 12	99,62	98,54	97,88
	• 13 – 15	91,45	96,60	94,96
	• 16 – 18	77,13	71,92	69,12
	• 19 - 24	19,64	25,51	-
9	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	7,04	7,05	7,06

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2014-2016
 Indikator Pendidikan Sulawesi Selatan Tahun 2016
 Keterangan : (-) = data tidak tersedia

Tabel 4. Beberapa Indikator Kesehatan Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2016

No	Indikator	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rumah Sakit	1	1	1
2	Puskesmas	17	17	17
4	Puskesmas Pembantu	44	44	44
5	Dokter Umum+Gigi	65	61	50
6	Perawat	257	153	148
7	Bidan	104	82	80
8	Praktek Dokter	51	51	35
9	Posyandu	319	324	327
10	Angka Harapan Hidup (tahun)	68,42	68,52	68,62
11	Lama Pemberian ASI terhadap Balita (%)			
	• 0-11 bulan	-	-	52,27
	• 12 - 15 bulan	-	-	28,07
	• 16 - 19 bulan	-	-	18,08
	• 20 - 23 bulan	-	-	1,58
12	Penolong Persalinan terhadap Balita (%)			
	• Tenaga Medis	75,35	100,00	94,35
	• Tenaga Non Medis	24,65	0	5,65

Sumber : Soppeng dalam Angka 2015-2017
 Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2014-2016
 Keterangan ; (-) =data tidak tersedia

Tabel 5. Beberapa Indikator Perumahan Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2016

No	Indikator	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Lantai Rumah (%)			
	• Luas lantai < 50 m ²	21,73	21,73	21,73
	• Lantai bukan tanah	99,25	99,16	99,90
2	Dinding Terluas Rumah (%)			
	• Dinding tembok/ kayu	60,66	63,82	54,37
	• Dinding bukan tembok/ kayu	39,34	36,18	45,63
3	Atap Terluas Rumah (%)			
	• Bukan ijuk/daun-daunan	99,65	99,86	99,53
	• Ijuk/daun-daunan	0,35	0,14	0,47
4	Sumber Air Minum			
	• Air Bersih	94,09	92,41	88,55
	• Bukan Air Bersih	5,91	7,58	11,45
5	Sumber Penerangan Rumah Tangga (%)			
	• Penerangan listrik	97,28	96,92	98,79
	• Penerangan bukan listrik	2,72	3,08	1,21
6	Penggunaan Kakus Rumah Tangga (%)			
	• Menggunakan Kakus	91,89	93,00	94,37
	• Tidak Menggunakan Kakus	8,1	7,00	5,62
7	Penggunaan Jenis Kloset Rumah Tangga (%)			
	• Leher Angsa/Plengsengan	98,05	98,05	98,05
	• Cubluk/cemplung dan tidak ada	1,95	1,95	1,95
8	Penggunaan Tempat Pembuangan Akhir Tinja (%)			
	• Tangki/SPAL	78,08	69,81	76,80
	• Bukan Tangki/SPAL	21,92	30,2	23,2

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2014-2016

Tabel 6. Beberapa Indikator Lainnya Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2016

No	Indikator	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Golongan Pengeluaran Per Kapita (%)			
	• ≤99.999 rupiah	0	0,9	4,19
	• 100.000-149.999 rupiah	1,46	12,57	11,75
	• 150.000-199.999 rupiah	9,37	20,00	18,25
	• 200.000-299.999 rupiah	28,03	32,76	29,54
	• >300.000 rupiah	61,14	33,76	36,27
2	Pengeluaran Per Kapita Sebulan (Rp)			
	• Makanan	295 520	301 659	225 980
	• Non Makanan	359 297	306 377	225 980
	• Total Pengeluaran	654 817	608 036	451 960
3	Pola Konsumsi Penduduk (%)			
	• Makanan	45,13	49,61	50,00
	• Non Makanan	54,87	50,39	50,00
4	Penduduk Miskin (%)	8,76	8,35	8,44
5	Jumlah Penduduk Miskin (ribuan)	19,78	18,88	19,12

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2014-2016

DATA

BANGSA

MENCERDASKAN

<https://soppengkab.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SOPPENG

Jl. Salotungo, Watansoppeng. Telp (0484) 21060, Fax (0484) 23377

Homepage: <http://soppengkab.bps.go.id> Email: soppengkab@bps.go.id